

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGEMBANGKAN USAHA KECIL MENENGAH
(UKM) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

(Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**REZA NANTA TONNY ISLAM DERMAWAN
135030507111017**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017**

MOTTO

“Jangan pernah berpikir tentang baik atau tidaknya sebuah hasil,
berpikirlah tentang bagaimana memperbaiki sebuah hasil”
(Reza Nanta Tonny I.D)

“Kesuksesan adalah bukan sekedar apa saja yang anda miliki tetapi
apa saja yang telah anda berikan kepada orang lain”
(Reza Nanta Tonny I.D)

LEMBAR PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya, Ayah Juli Witono dan Ibu Sutini, yang telah mendidik saya dengan berbagai pengalaman yang baik dan mengajarkan bermacam-macam arti kehidupan, selalu mensupport, memberi banyak dukungan moril maupun materi yang luar biasa. Terimakasih untuk cinta, kesabaran, doa dan dukungan terbaik yang telah diberikan selama ini.”

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil
Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi
(Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Disusun oleh : Reza Nanta Tonny Islam Dermawan

NIM : 135030507111017

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan

Malang, 23 Oktober 2017

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Januari 2018
Jam : 08.00-09.00
Skripsi atas nama : Reza Nanta Tonny Islam Dermawan
Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Malang, 12 Januari 2018

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Penguji I



Dr. Riyanto, M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Penguji II



Ike Arni Noventi, S.AP., M.AP
NIP. 201309861009 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 4 Oktober 2017



Nama : Reza Nanta Tonny I.D

NIM : 135030507111017

RINGKASAN

Reza Nanta Tonny Islam Dermawan, 2017, **Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)**, Dr. Sarwono, M.Si, Universitas Brawijaya, 171 hal + xx.

Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara material maupun imaterial. Salah satu titik beratnya diletakkan di bidang ekonomi, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional dengan cara saling memperkuat, saling gotong royong. Perkembangan perekonomian saat ini sangat cepat dan dinamis terutama di dalam dunia usaha tidak terkecuali koperasi dan usaha kecil menengah. Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan dan ketahanan perekonomian nasional. Permasalahan UKM yang sedang berkembang saat ini yaitu banyaknya UKM yang tidak sehat, tidak adanya legalitas, dan masalah pemasaran produk. Untuk mengatasi masalah UKM tersebut dibutuhkan strategi yang baik dari Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang kurang optimal, maka perlu adanya analisis strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam mengembangkan UKM berbasis teknologi informasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan UKM yang berbasis teknologi informasi; Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis tantangan strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan UKM yang berbasis teknologi informasi; Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis rekayasa teknologi di dalam mengoptimalkan strategi pemerintah daerah di dalam mengembangkan UKM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah strategi agresif, strategi konserpatif, strategi kompetitif, strategi difensif, strategi diversifikasi, dan strategi preventif; tantangan internal dan tantangan eksternal; serta rekayasa teknologi dalam mengoptimalkan strategi tersebut. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles, Huberman dan Saldana dan model teoritik alternatif yang berupa Inter-layer dan Multi-layer Analysis (Sarwono, 2008).

Hasil Penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yaitu strategi agresif, strategi konserpatif, strategi kompetitif, strategi difensif, strategi preventif, dan strategi inovatif sudah dijalankan dengan baik. Sedangkan strategi diversifikasi belum dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Tantangan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Teknologi dan Informasi di Kota Malang meliputi tantangan internal yaitu sumber daya dalam bidang teknologi kurang dan sulitnya modal, tantangan eksternal yaitu pengetahuan masyarakat terhadap teknologi informasi kurang dan responsifitas pelaku UKM. Rekayasa teknologi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yaitu E-UKM. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang perlu mengadakan sosialisasi, pembinaan, pelatihan-pelatihan yang lebih instensif lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM di dalam bidang teknologi dan informasi, dan dapat menjalankan dengan optimal media online tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan dan target pasar. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang perlu melakukan pengoptimalan dalam strategi agresif, agar memiliki sumber-sumber permodalan dari berbagai sumber, salah satunya sponsor yang dapat meningkatkan dan menguatkan permodalan di dalam pelaksanaan strategi dan menunjang kegiatan permodalan para pelaku UKM.

Kata Kunci: Pembangunan Nasional, Usaha Kecil Mengengah (UKM), Teknologi Informasi

SUMMARY

Reza Nanta Tonny Islam Dermawan, 2017, **Local Government Strategy in Developing Small and Medium Enterprises (SMEs) Based on Information Technology (Study on Cooperative Office and Micro Enterprises in Malang)**, Dr. Sarwono, M.Si, University of Brawijaya, 171 pages + xx.

National development is a manifestation of efforts to achieve a just and prosperous society that is evenly distributed both materially and immaterial. One of the emphasis is placed on economics, which is an important factor in national development by mutually strengthening and cooperating. Moreover, the current economic development is very fast and dynamic, including cooperatives and small and medium enterprises. Thus, development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia is one of the priorities in the development and resilience of the national economy. However, the current problems of SMEs are numerous unhealthy SMEs, lack of legality, and product marketing problem. To overcome those problems, the local government of Malang are required to have a good strategy through the Office of Cooperatives and Micro Enterprises. Strategies that is now being undertaken by the Office of Cooperatives and Micro Enterprises Malang city is currently not working optimally, thus it is necessary to analyze the strategy of Department of Cooperatives and Micro Enterprises Malang in developing SMEs based on information technology.

The purpose of this study is to know, describe, and analyze local government strategies in developing SMEs based on information technology; knowing, describing, analyzing the local government's strategy challenges in developing information technology-based SMEs; knowing, describing, analyzing technological engineering in optimizing local government strategy in developing SMEs. This research uses research type of qualitative descriptive method. Data collection techniques that were used are observation techniques, interviews, and documentation. The focus of this research is aggressive strategy, conservative strategy, competitive strategy, defensive strategy, diversification strategy, and

preventive strategy; internal challenges and external challenges; as well as engineering technology while optimizing the strategy. Data analysis used that were used are Miles, Huberman and Saldana and alternative theoretical model in the form of Inter-layer and multi-layer analysis (Sarwono, 2008).

The results of this study indicate the strategies undertaken by the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Malang are the aggressive strategy, conservative strategy, competitive strategy, defensive strategy, preventive strategies, and innovative strategies have been run well. However, the diversification strategy has not been run by the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Malang. The challenges of local government strategy in developing Small and Medium Enterprises based on technology and information in the city of Malang covers the internal challenge of resources in the field of less technology and monetary capital difficulties, while the external challenges are the lack of public knowledge on information technology and low responsiveness of SMEs owners. Technological engineering undertaken by the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Malang is currently the E-SME. In conclusion, Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Malang needs to conduct socialization, guidance, training that is run more intensively in order to improve the quality of human resources in the field of technology and information, and run their online medias optimally as one of the source of revenue and also to gain target market. Moreover, Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Malang needs to optimize in aggressive strategy, in order to have sources of capital from various sources, one of which sponsor can improve and strengthen capital in execution of strategy and support activity of capital of SMEs perpetrators.

Keywords: National Development, Small Medium Enterprises (SMEs),
Information Technology

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc, selaku Koordinator Minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Sarwono, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi terutama Dosen Program Minat Administrasi Pemerintahan, Jurusan Administrasi Publik yang

telah bersedia memberikan ilmu selama proses belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.

6. Pimpinan, Staff, dan Karyawan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
7. Para narasumber Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang bersedia dalam memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi dan bersedia memberikan waktunya untuk melakukan observasi bersama penulis.
8. Kepada kedua orang tuaku, Ayah Juli Witono dan Ibu Sutini yang telah mendukung, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah ada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Seseorang yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat, memberikan pengarahan dalam pengerjaan skripsi dan kasih sayangnya.
10. Arados-aradosku Wina Ardian Rusady, Yudho Hadi Prasetyo, Ahmad Rizal Habibi, Fathir Achmad Sulaiman yang telah memberi motivasi.
11. Teman-teman Administrasi Pemerintahan angkatan 2013 yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat yang tak terhingga hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai proses

pembelajaran yang terus menerus, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| MOTTO | ii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | iii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| TANDA PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| RINGKASAN | vii |
| SUMMARY | ix |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR GRAFIK | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 15 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Pemerintah Daerah..... | 17 |
| B. Otonomi Daerah..... | 24 |
| C. Ekonomi Kerakyatan..... | 30 |
| D. Elektronik Government..... | 35 |
| 1. Pengertian E-Government..... | 35 |
| 2. Ruang Lingkup E-Government..... | 37 |
| 3. Konsep Pengembangan Infrastruktur E-Government..... | 40 |
| 4. Landasan Pelaksanaan E-Government..... | 41 |
| 5. Manfaat Penerapan E-Government..... | 42 |
| E. Strategi..... | 42 |
| 1. Pengertian Strategi..... | 42 |
| 2. Tipe dan Jenis Strategi..... | 44 |
| F. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)..... | 46 |
| 1. Pengertian UKM..... | 46 |
| 2. Asas dan Tujuan UKM..... | 47 |
| 3. Kriteria UKM..... | 48 |
| G. Teknologi dan Informasi..... | 49 |
| 1. Pengertian Teknologi dan Informasi..... | 49 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi..... | 50 |
| 3. Komponen-komponen Teknologi dan Informasi..... | 52 |
| 4. Peran Teknologi Informasi Bagi Perusahaan..... | 54 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 57 |
| A. Jenis Penelitian..... | 57 |
| B. Fokus Penelitian..... | 58 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian..... | 60 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 61 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 64 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 65 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 66 |
| H. Keabsahan Data..... | 70 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 72 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian..... | 72 |
| 1. Gambaran Umum Kota Malang..... | 72 |
| a. Sejarah Kota Malang..... | 72 |
| b. Kondisi Geografi dan Demografi Kota Malang..... | 73 |
| 1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... | 74 |
| 2) Karakteristik Demografi..... | 75 |
| 2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 76 |
| a. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 76 |
| b. Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 77 |
| c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 79 |
| B. Penyajian dan Analisis Data..... | 90 |
| 1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi..... | 90 |
| a. Strategi Agresif..... | 90 |
| b. Strategi Konservatif..... | 96 |
| c. Strategi Kompetitif..... | 111 |
| d. Strategi Difensif..... | 120 |
| e. Strategi Diversifikasi..... | 122 |
| f. Strategi Preventif..... | 131 |
| g. Strategi Inovatif..... | 137 |
| 2. Tantangan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Berbasis Teknologi Informasi..... | 143 |
| a. Tantangan Internal..... | 143 |
| 1) Sumber Daya Manusia..... | 143 |
| 2) Permodalan..... | 144 |
| b. Tantangan Eksternal..... | 145 |
| 1) Pengetahuan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)..... | 145 |
| 2) Responsifitas Pelaku Usaha Kecil Menengah..... | |

| | |
|--|-----|
| (UKM)..... | 148 |
| 3. Rekayasa Teknologi untuk Mengoptimalkan Strategi Pemerintah Daerah di dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Malang..... | 150 |
| BAB V PENUTUP | 158 |
| A. Kesimpulan..... | 158 |
| B. Saran..... | 160 |
| DAFTAR PUSTAKA | 162 |
| LAMPIRAN | 166 |

DAFTAR TABEL

| No. | Judul | Hlm. |
|------------|---|-------------|
| 1 | Data Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang Tahun 2014-2016..... | 8 |
| 2 | Daftar Informan Penelitian..... | 63 |
| 3 | Perumusan Rencana Strategik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 94 |
| 4 | Kegiatan, Alokasi Dana dan Realisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2016..... | 99 |
| 5 | Daftar Nama Paguyuban UKM Kota Malang..... | 108 |
| 6 | Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2016..... | 113 |
| 7 | Rencana Program, Kegiatan SKPD 2013-2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 123 |
| 8 | Program Efektif dan Inovatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 147 |

DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul | Hlm. |
|------------|--|-------------|
| 1 | Aplikasi Daerah Kota Malang..... | 10 |
| 2 | E-Government Kota Surabaya..... | 11 |
| 3 | Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif..... | 66 |
| 4 | Inter-layer dan Multi-layer Analysis..... | 70 |
| 5 | Peta Kota Malang..... | 73 |
| 6 | Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2017..... | 76 |
| 7 | Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 79 |
| 8 | Galeri UKM pada Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 89 |
| 9 | Wawancara bersama Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang..... | 92 |
| 10 | Produk Keripik dan Tempe hasil produksi UKM Kota Malang..... | 109 |
| 11 | Produk Tas hasil produksi UKM Kota Malang..... | 110 |
| 12 | Produk Aksesoris hasil produksi UKM Kota Malang..... | 110 |
| 13 | Produk Pakaian hasil produksi UKM Kota Malang..... | 111 |
| 14 | Sosialisasi September 2017 di Hotel Sahid Montana 2 Malang... | 134 |
| 15 | Pelatihan yang diadakan Dinkop dan UM pembuatan produk olahan..... | 134 |
| 16 | Koperasi dan UMKM Expo 2017 pada 27 Juli 2017 di Grand City Convex..... | 135 |
| 17 | Bimtek E-UKM di dalam rapat anggota di Hotel Sahid Montana..... | 136 |
| 18 | Prosedur Pendaftaran Member E-UKM Kota Malang..... | 156 |

DAFTAR GRAFIK

| No. | Judul | Hlm. |
|------------|---|-------------|
| 1 | Data Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang Tahun 2014-2016..... | 9 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul | Hlm. |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Pedoman Wawancara..... | 166 |
| 2 | Surat Rekomendasi Penelitian..... | 170 |
| 3 | Curriculum Vitae..... | 171 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik merupakan sebuah sistem kerja sama yang dalam pelaksanaan segala kegiatan tidak pernah lepas dari proses kerjasama itu sendiri. Menurut Siagian (2009:4), administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Pfiffner dan Presthush seperti yang dikutip oleh Syafiie (2006:23), *Public administrastion is a procces concerned with carrying out public policies*, yang memiliki arti administrasi negara adalah suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi publik merupakan sebuah sistem yang di terdiri dari bagian-bagian subsistem.

Administrasi publik memiliki subsistem, salah satunya adalah adanya suatu organisasi. Organisasi sendiri merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, dimana organisasi sangat lekat dengan kehidupan manusia baik secara langsung, maupun tidak langsung. Organisasi dapat berupa macam-macam, misalnya organisasi politik, organisasi sosial, organisasi niaga, dan lain sebagainya. Menurut Gibson et.al (1985:7) seperti yang dikutip oleh Winardi (2003:13) menyatakan bahwa, “Organisasi organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri.

Organisasi sendiri tidak lepas dari pengembangan organisasi, karena pengembangan organisasi adalah proses yang terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang dinamis sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang optimal oleh seluruh anggota organisasi. Pengembangan organisasi adalah hal yang sangat penting di dalam organisasi, karena manusia, pekerjaan, dan organisasi adalah hal yang sangat berkaitan erat.

Pengembangan organisasi merupakan suatu perubahan organisasi, oleh karena itu Siagian (1995:21) menyatakan bahwa, “Perlunya perubahan harus dirasakan, karena hanya dalam kondisi demikianlah para anggota organisasi dapat diyakinkan bahwa upaya mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi, diperlukan cara kerja baru, metode kerja yang baru, bahkan strategi dan visi yang baru. Pengembangan organisasi harus dilakukan secara bersinambungan dan dinamis, dalam hal ini melibatkan seluruh aparatur yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Sumber daya aparatur merupakan penggerak terjadinya proses pengembangan organisasi.

Sumber daya aparatur adalah elemen yang sangat penting yang terdapat di dalam pengelolaan suatu organisasi, oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dalam pengembangan organisasi demi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kekuatan serta sumber daya aparatur ditentukan oleh sifat dan karakter yang melekat pada setiap individu dan lingkungannya. Organisasi yang tumbuh dan berkembang akan menitikberatkan perhatiannya pada sumber daya aparatur guna menjalankan fungsinya dengan optimal khususnya menghadapi dinamika

perubahan lingkungan yang terjadi. Kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral dari pelaku organisasi diseluruh tingkat pekerjaan sangat dibutuhkan. Kinerja sumber daya aparatur di setiap organisasi senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin maju, dimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat meningkat. Berbagai cara dilakukan oleh organisasi demi dapat bertahan dan berkembang di dalam proses pengembangan organisasi. Bagi para pemimpin harus dapat mencari solusi dalam menghadapi berbagai hambatan dan masalah yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Secara umum peran manusia di dalam organisasi adalah faktor penentu berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Simamora (1995:1) menyimpulkan bahwa sumber daya manusia (aparatur) membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja. Jadi, manusia sebagai titik sentral yang sekaligus subjek dan objek di dalam organisasi, sedangkan organisasi adalah alat untuk memenuhi dan mencapai tujuan manusia. Organisasi skala besar seperti negara Indonesia, tugas negara adalah untuk memenuhi dan mencapai tujuan warga negaranya yang bisa dilihat dari pembangunan nasional yang dilakukan Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan aktifitas yang terjadi dalam organisasi secara makro, yaitu negara dengan aparatur dan warga negara yang tinggal di dalam negara tersebut. Pembangunan nasional merupakan bentuk pembangunan berkelanjutan yang berorientasi oleh, dari dan untuk rakyat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Salah satu kunci pokok di dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan

nasional di bidang ekonomi. Pembangunan nasional di dalam bidang ekonomi diarahkan pada Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila kelima yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima mencakup upaya untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju pada kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara material maupun imaterial. Salah satu titik beratnya diletakkan di bidang ekonomi, yang merupakan faktor yang sangat penting di dalam pembangunan nasional dengan cara saling memperkuat, saling gotong royong di dalam pembangunan yang lainnya dilakukan secara selaras, serasi, seimbang, dan bersinambungan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pemerintah harus berperan aktif di dalam upaya pembangunan nasional, salah satunya adalah mendukung masyarakat dengan pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Perkembangan perekonomian saat ini sangat cepat dan dinamis, terutama di dalam dunia usaha tidak terkecuali koperasi dan usaha kecil menengah. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992, pada pasal 1 disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 1 disebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya (Hubeis:2009). Perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai tentang UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Salah satu cara yang efektif demi kebaikan UKM adalah pembinaan dan pengembangan UKM sangat berguna bagi keberlangsungannya dan kemajuan UKM tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercantum tujuan dari UKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan. Persamaan tujuan antara koperasi dan

UKM, yaitu membangun tatanan perkeekonomian yang berasaskan sesuai dengan soko guru ekonomi negara kita adalah ekonomi kerakyatan. Keikutsertaan pemerintah adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan perekonomian rakyat. Pemerintah berfungsi sebagai pendorong, pembina, dan pengembangan strategi di dalam keseimbangan antar pelaku ekonomi.

Pengembangan UKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan dan ketahanan perekonomian nasional. Hal ini tidak lain karena UKM adalah salah satu faktor yang sangat penting di dalam tulang punggung ekonomi kerakyatan yang ditujukan mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah, dan ketahanan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, mengurangi kemiskinan serta pengangguran. Secara nasional, pengembangan UKM di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Banyak program yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang kemudian diteruskan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing Kabupaten/Kota.

Demikian pula mengenai Pengembangan UKM di Kota Malang yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Pengembangan UKM ini dilakukan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan, yaitu pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil menengah; dan Bidang Usaha, Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi (UFPK) yaitu pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengembangan

koperasi dan UKM di bidang pembiayaan dan jasa keuangan termasuk permodalan.
(<http://dinkop.malangkota.go.id>)

Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, kondisi UKM di Kota Malang tidak semuanya dalam kondisi yang baik dan dapat berfungsi dengan baik. Banyak UKM yang ada di Kota Malang dalam kondisi yang memprihatinkan, dimana sebagai salah satu pembangun perekonomian nasional, banyak UKM yang dalam kondisi yang tidak sehat, bahkan diantaranya izinnya dicabut karena sudah sangat sulit untuk diperbaiki. Sebenarnya tidak mudah mencabut izin sebuah UKM yang sudah beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat. Namun, pencabutan izin tidak bisa dihindari jika kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi pengoperasiannya. Banyaknya UKM yang masuk kategori tidak sehat itu salah satunya adalah karena tidak pernah lagi memberikan laporan, apalagi mengevaluasi diri UKM tersebut, karena banyaknya UKM yang sudah tidak aktif menyebabkan proses revitalisasi sangat sulit untuk dilakukan karena berbagai kendala yang dihadapi.

Kendala yang umum dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk merevitalisasi kembali UKM yang tidak sehat tersebut salah satunya adalah karena sulitnya jalinan komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan para pelaku UKM yang bersangkutan. Ketika ditelusuri banyak UKM yang hanya tinggal sebuah nama saja dan bahkan tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan di UKM tersebut. Permasalahan lain dari UKM yang tidak sehat adalah distribusi anggaran yang kurang tepat sasaran dan tidak

merata yang diberikan berdasarkan proposal yang diajukan pelaku UKM, dimana kredit jangka panjang dengan masa angsuran 10 tahun yang berbunga 6% per tahun atau sama dengan bunga 0,5% per bulan (<http://dinkop.malangkota.go.id>).

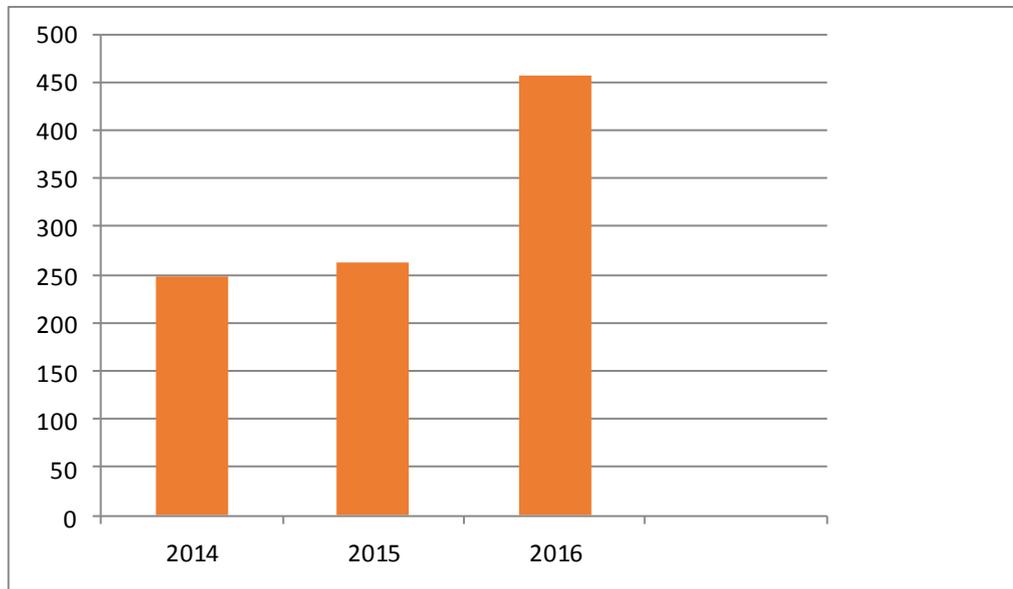
Produk UKM adalah seluruh hasil dari berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi dan dikelola secara komersial oleh para pelaku UKM dan biasanya dikerjakan secara manual (*handmade*). Produk UKM sangat berpotensi meningkatkan perekonomian rakyat serta berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Produk UKM yang dihimpun oleh Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, jumlah pelaku usaha kecil di Kota Malang cukup meningkat pada setiap tahunnya dimana mereka secara garis besar bergerak pada jenis usaha Mebel, Aneka Kripik, Bordir, Tempe Jaya, Kerajinan Ukir, Jajanan, Jamu, Kompos, Konveksi, Kripik tempe, PIA Jagung, Ikan Hias, Bumbu Pecel, Batik, Bordir, Jamu, Aneka Camilan, Kue, Singkong Keju, Aneka Camilan, Omah Rajut, Pakaian, Aneka Bakery, dll. (<http://dinkop.malangkota.go.id>).

**Tabel 1. Data Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang
Tahun 2014-2016**

| Tahun | Jenis Usaha | Jumlah |
|-------|--|--------|
| 2014 | Mebel, Aneka Kripik, Bordir, Tempe Jaya, Kerajinan Ukir, Jajanan, Jamu, Kompos, Konveksi, dll | 249 |
| 2015 | Kripik tempe, PIA Jagung, Ikan Hias, Bumbu Pecel, Batik, Bordir, Jamu, Aneka Camilan, Kue, dll | 262 |
| 2016 | Singkong Keju, Aneka Camilan, Omah Rajut, Pakaian, Aneka Bakery, dll | 457 |
| Total | | 968 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

**Grafik 1. Data Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang
Tahun 2014-2016**



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Secara umum anggota UKM di Kota Malang memiliki keterbatasan di dalam penguasaan teknologi informasi. Sementara tuntutan kebutuhan atas penggunaan dan penguasaan teknologi informasi tersebut sudah terasa semakin mendesak mengingat tingkat persaingan di pasar lokal, regional maupun global, dimana setiap pelaku usaha sudah mulai dituntut untuk mampu menyajikan informasi secara cepat dan akurat kepada pelanggannya. Teknologi informasi juga akan meminimalisir kesalahan antara kemampuan penyediaan barang dengan tingginya tingkat permintaan pasar. Kondisi ini membutuhkan suatu solusi yang komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah kota Malang yaitu pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) pelayanan online yang diterapkan di

kelurahan-kelurahan Kota Malang. *E-government* adalah sistem pelayanan yang diterapkan berbasis online yang memanfaatkan Teknologi Informasi (TI). Kesadaran terhadap media yang informasi yang semakin canggih Pemerintah Kota Malang memanfaatkan *E-Government* dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakatnya serta meningkatkan efektifitas dan aksesibilitas. Pelayanan yang berbasis online perlu adanya pengawasan terhadap sistem pelayanan tersebut Pemerintah Kota Malang membuat pelayanan Pengaduan *online* yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelayanan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Malang yang berisi pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah kota malang. Berikut merupakan aplikasi daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Malang:

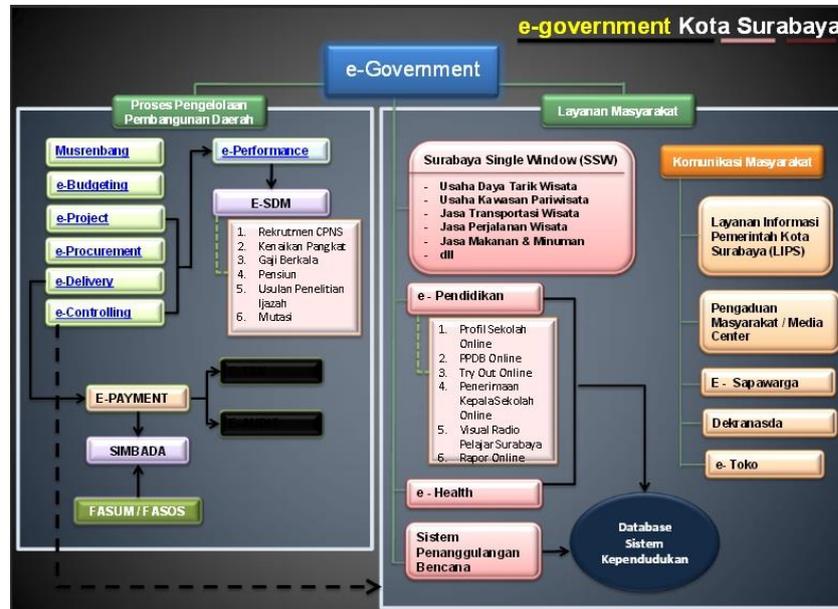


Gambar 1. Aplikasi Daerah Kota Malang

Sumber: www.malangkota.go.id

Kota Malang mempunyai E-Government yang tidak kalah maju dengan Kota Surabaya. E-Government Kota Surabaya memang sangatlah pesat dan

menjadi acuan bagi beberapa kota di Indonesia termasuk Kota Malang. E-Government yang diterapkan di Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. E-Government Kota Surabaya

Sumber: www.surabaya.go.id

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dimana dalam melakukan tahapan persiapan dalam pelaksanaan *e-government* perlu pendidikan dan pelatihan dalam penerapan *e-government*. Hasil penelitian, sistem *database* UKM merupakan cara mudah dalam mengumpulkan dan mengolah data UKM di Kota Malang. Sistem ini dapat membantu pegawai terutama di bidang UKM untuk mempermudah pekerjaannya dan dapat mengontrol semua UKM Kota Malang melalui data yang ada. Apabila dikaitkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan

UKM Kota Malang termasuk dalam tahap pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi yang bersifat G2C (*Government to Citizen*) dimana terdapat hubungan antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan UKM yang ada di Kota Malang berupa data-data yang diberikan oleh UKM.

Di Kota Malang, infrastruktur yang kurang memadai dan masih rendahnya pendapatan rata-rata masyarakat, menjadi faktor yang menyebabkan lambatnya adopsi teknologi di UKM. Stoeken dan Couman (1998) dalam Wahid (2007) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap peran strategis yang dapat dimainkan oleh Teknologi Informasi (TI) terkait dengan pendekatan baru pemasaran, hubungan dengan konsumen, dan pengembangan produk dan layanan diduga sebagai sebab rendahnya adopsi TI oleh UKM. Pertumbuhan pengguna internet yang cukup tinggi menjadi indikasi adanya kemauan pelaku bisnis dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan *electronic-commerce (e-commerce)*, terutama di UKM. Peran UKM yang signifikan dan terbukti sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat tentunya perlu ditingkatkan agar dapat berkembang secara lebih luas dan mempunyai daya saing. Daya saing UKM dapat diwujudkan salah satunya dengan penggunaan TI untuk meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi (Rahmana, 2009), dan memperluas jaringan pemasaran. Peningkatan daya saing UKM ini sangat diperlukan agar UKM mampu bertahan dan bersaing dalam kancah perdagangan global.

Perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat, dimana membawa pengaruh yang cukup besar dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang bisnis atau usaha. Seorang pengusaha memerlukan bantuan suatu sistem informasi yang

terkomputerasi dengan baik untuk memaksimalkan kinerja bisnis dalam mengatur sebuah bisnis, yang semula pengolahan data dilakukan secara manual akan diolah dan disajikan menjadi data elektronik. Selain itu informasi yang telah terintegrasi ini juga dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, relevan, lengkap dan tepat kepada pengusaha dalam menentukan langkah-langkah bisnis selanjutnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang harus melakukan langkah strategis guna melakukan pengembangan UKM. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tentunya memiliki strategi di dalam mengembangkan UKM yang dibinanya, karena strategi adalah salah satu kunci agar UKM dapat bertahan dan berkembang demi keberlangsungan para pelaku UKM. Strategi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis, oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang baik untuk pelanggan (Bambang Hariadi: 2003). Strategi dalam suatu tujuan memiliki kaitan erat dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi.

Berdasarkan hal tersebut, strategi penanganan yang lebih serius, bersifat multisektor dan dijalankan secara terkoordinir sangat penting untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan UKM. Strategi penanganan ini dimaksudkan agar UKM semakin berkembang dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk mengetahui seberapa jauh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mengembangkan **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbasis teknologi informasi?
2. Apa tantangan strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbasis teknologi informasi?
3. Bagaimana rekayasa teknologi di dalam mengoptimalkan strategi pemerintah daerah di dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbasis teknologi informasi.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis tantangan strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbasis teknologi informasi.
3. Mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis rekayasa teknologi di dalam mengoptimalkan strategi pemerintah daerah di dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan pengembangan UKM berbasis teknologi informasi.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu upaya untuk dapat mengetahui strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbasis informasi sehingga dapat meningkatkan peran dari pelaku UKM dalam memasarkan produknya secara mandiri melalui E-UKM.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah yang disusun secara garis besar guna memudahkan pembaca untuk mengetahui substansi yang terkandung di dalam karya ilmiah. Berdasarkan susunannya, Skripsi ini diuraikan ke dalam lima bab yang sistematika dan alur pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya karya ilmiah ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menyajikan teori-teori yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan penyusunan karya ilmiah tentunya berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menjaga daya saing produk UKM dengan Multinasional. Teori yang digunakan diantaranya teori Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Ekonomi Kerakyatan, Electronic Government, Strategi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Teknologi Informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang berbagai informasi mengenai hasil pembahasan dari penelitian, penyajian data, analisis data, dan gambaran umum.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merupakan otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atas daerah otonom. Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Hal ini dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - dan
 - f. Sosial
- 2) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertahanan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan
- 3) Urusan pemerintah pilihan meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara segala urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pemerintah ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of men/women in a nation state, city, etc.* Terjemahan dari pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya (Riawan, 2009:197). Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau kota dan sebagainya. Pemerintahan dilihat dari sifatnya adalah pemerintah dalam arti yang luas yang meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W.Riawan Tjandra, 2009:197). Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah (Abdurrahman:1987).

Pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu dinas-dinas daerah.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten dan kota. Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Peran pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah wewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah, bahwa “Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan”. Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. Kedua, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi negara untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang secara khusus. Ketiga, demokrasi kita juga tak lepas dari isu yang sekarang menjadi trend di dunia internasional, yang dibutuhkan tentu saja bukan masalah ideal namun teknikal.

Peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di dalam melaksanakannya, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Hal tersebut juga seperti yang dikemukakan oleh Kaloh yang dikutip oleh Katiwa dan Nugraha (2012:40), “Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat, baik pada Negara

Kesatuan maupun Negara federasi. Otonomi daerah pada Negara Kesatuan lebih terbatas daripada di Negara Federasi. Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah di Negara Kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.”

Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang beraneka ragam. Keaneka ragaman tersebutlah yang mampu mendorong masyarakat untuk mengelola potensi daerahnya untuk bergerak maju dan lebih berkembang. Otonomi daerah merupakan langkah agar daerah mampu mengelola keaneka ragaman dan potensinya masing-masing demi pembangunan nasional yang baik. Selain dari pembangunan nasional yang baik, otonomi daerah juga menunjang terciptanya kemandirian daerah tersebut mengelola potensi yang dimiliki.

Tujuan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi dan kreasi daerah dengan cara-cara yang sesuai serta memanfaatkan keragaman budaya sebagai aset pembangunan nasional, otonomi daerah dalam pelaksanaannya dimaksudkan untuk menuai manfaat yang dapat dirasakan bagi kesejahteraan rakyat, *economic efficiency, maximizing utilization of scarcity of resource*, menciptakan lapangan kerja, perbaikan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kartiwa dan Nugraha, 2012:78).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dasar Hukum Pemerintah Daerah dengan kaitannya dengan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
3. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)
4. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang yang merujuk kepada Pasal 14 Tentang Pelaksanaan UKM dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peran pemerintah daerah di dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangatlah vital dan Pemerintah Daerah memegang peran penting di dalam pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberikan daya atau kemampuan kepada seseorang yang dilakukan melalui pemberian pengetahuan, penguatan modal, dan sumber daya manusia serta perlindungan atas produk. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dilakukan untuk menumbuh kembangkan usaha yang sehat, tangguh dan mampu berdaya saing. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perannya sangat penting dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mengembangkan Teknologi Informasi yang diterapkan. Demi tercapainya daya saing dan target pasar yang sesuai harapan, karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggunakan pemberdayaan yang berbasis teknologi dan informasi berupa *website* sebagai salah satu upaya dalam

pemberdayaan UKM dan strategi pemasaran. Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing dan meningkatkan UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha serta mengakses sistem pendukung usaha, kualitas pelayanan UKM sesuai dengan misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro.

B. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Menurut Simanjutak (2010:102) dalam bahasa Yunani, *auto* berarti “sendiri” dan *namous* berartikan “hukum” atau “peraturan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, sedangkan menurut Suryaningrat (1985) istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *auto* yang berarti sendiri dan *namous* yang berarti Undang-undang atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Oppenheim, (dalam Ibrahim, 1991:50) mendefinisikan otonomi daerah adalah bagan organisasi dari negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan Negara Kesatuan. Daerah otonomi ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah adalah merupakan pancaran kedaulatan rakyat dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah (Isworo:2007). Demikian pernyataan bahwa otonomi merupakan milik masyarakat berarti masyarakat tersebut sebagai subjek dan bukannya objek.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004:66 menerangkan bahwa, otonomi daerah adalah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom, dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abdullah dalam Tri Puja Kesuma (2002:11) berpendapat bahwa, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat dalam kerangka negara kesatuan. Daerah memiliki historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menginformasikan seluruh daerah menurut suatu model. Menurut pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ayat 69, yang dimaksud dengan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Simanjutak (2013:66) mendefinisikan otonomi

daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerah dengan baik, tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan masyarakat sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undang.

Menurut Manan (2002:24-25) mendefinisikan otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan bukan hanya tatanan administrasi negara sebagaimana tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Arah dasar susunan ketatanegaraan dalam perumusan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. Otonomi bukan sekedar pemekaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan.

Menurut Kaho (1997) mendefinisikan otonomi daerah adalah mula-mula otonomi atau berotonom berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak, kekuasaan, kewenangan, untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian istilah otonomi itu berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan (Abdullah, 2003:10).

Menurut Syauckani (2000:147) mendefinisikan otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *selfgovernment* yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat. Otonomi lebih menitik beratkan aspirasi masyarakat setempat daripada kondisi. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan warga. Kesatuan Republik Indonesia (Koesoemahatmaja, 1971:9). Menurut Wayong (1975:5) mendefinisikan otonomi daerah adalah kebebasan memelihara dan menunjukkan kepentingan khusus suatu daerah dengan keuangan, hukum dan pemerintahan sendiri. Pembagian kekuasaan yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pilihan yang tepat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa daerah otonomi merupakan daerah kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan kebebasan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mandiri, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan fleksibel dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, serta bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur daerah dengan baik tidak ada kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah.

Otonomi daerah dari segi materil mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum. Hubungan pemerintah pusat dan daerah, dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan tentang kemerdekaan Indoenesia, sedangkan keempat memuat pernyataan tentang kemerdekaan yang pertama kali dibentuk ialah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan yang berbentuk kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Otonomi yang luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip kesatuan, dan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.

Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat, untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, dalam membentuk kebijakannya harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan yang lainnnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Demi terciptanya keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Otonomi daerah pada hakikatnya diberikan kepada rakyat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi ini adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden agar pelaksanaan urusan pemerintahan diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terkait dengan strategi pemerintah daerah dalam menjaga persaingan UKM Kota Malang, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kota Malang mempunyai dasar atau landasan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha, Mikro dan Menengah, bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan sebagai acuan terlaksananya strategi tersebut.

C. Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi adalah sebagai perkembangan ekonomi rakyat dengan segala aspek kehidupan mereka (ekonomi, politik, harga diri, kreativitas, solidaritas antar sesama, kemerdekaan yang berfungsi sosial, dll). Negara yang masih tergolong negara berkembang pada umumnya termasuk Indonesia masih mengandung struktur sosial yang tidak seimbang atau pincang, pengembangan ekonomi rakyat harus melalui cara-cara yang fundamental dan mengakar dalam

struktur sosial dan penguasaan aset ekonomi. Pembangunan ini bertujuan transformasi ekonomi bersamaan dengan *transformasi* sosial dalam arti pro-rakyat.

Sumber-sumber ekonomi akan ditujukan sebagian besar untuk keperluan rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran individual atau personal, karena ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan.

Membangun perusahaan yang sesuai adalah yang berbentuk koperasi. Rumusan nasionalisme ekonomi untuk Indonesia seperti yang diutarakan diatas menghendaki secara mutlak adanya suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bung Hatta sebagai perumus Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kebulatan pendapat yang hidup dalam perjuangan kemerdekaan pada zaman Hindia Belanda dahulu. Struktur perekonomian di masa itu terdapat tiga golongan, golongan atas ialah perekonomian kaum kulit putih terutama bangsa Belanda. Produksi yang berhubungan dengan dunia luaran hampir seluruhnya berada ditangan mereka, yaitu produksi perkebunan, produksi, industri, jalan perhubungan laut, sebagian di darat dan udara. Lapis ekonomi yang kedua, yang menjadi perantara dan

hubungan dengan masyarakat Indonesia berada kira-kira 90% ditangan orang Tionghoa dan orang Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam lapis kedua paling banyak sekitar 10%, itupun menduduki tingkat sebelah bawah. Mereka sanggup masuk ke dalam lapis kedua karena kegiatannya bekerja dibantu oleh modal yang dimilikinya. Lapis ketiga adalah perekonomian segala kecil:

1. Pertanian kecil
2. Pertukangan kecil
3. Perdagangan kecil
4. Dll

Ekonomi Indonesia pada itu masih di dalam lapis ketiga yaitu perekonomian kecil. Pekerja kecil seperti kuli, buruh kecil, dan pegawai kecil diambil dari masyarakat Indonesia. Perekonomian yang kecil tersebut, tidak mungkin masyarakat akan merangkak ke lapisan atasnya dengan kemampuan sendiri, kecuali beberapa ratus orang Indonesia ini memiliki modal usaha sedikit yang sanggup menempatkan dirinya dalam golongan dagang menengah yang hampir rata-rata diisi oleh orang Tionghoa dan orang-orang Asia lainnya.

Keadaan ekonomi kolonial semacam itulah dimana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur, tekanan dan isapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi (Hatta:1970) yang dikutip (Sritua Arif, 2002:120).

Restrukturisasi ekonomi yang bertujuan mengubah dialektik ekonomi zaman Kolonial Belanda, yang pada jalannya adalah selain dalam pengorganisasian ekonomi rakyat juga dilakukan upaya yang sistematis untuk menciptakan keseimbangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi Indonesia, terkhusus mengenai perimbangan kekuatan antara golongan Cina dengan pribumi Indonesia yang perlu diperbaiki melalui ekonomi seperti yang disampaikan oleh Bung Hatta (1970).

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah landasan dasar dari kekuatan ekonomi-politik nasional. Pada waktu krismon kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan. Ekonomi rakyat benar-benar mampu tahan banting dan bersaing. Pada waktu itu krismon memang lebih menerpa orang-orang kota dan menguntungkan orang-orang desa, karena bagi orang-orang desa tidak ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi memang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak lagi mampu “berburu rente” (*rent seekers*) yang berkeinginan dapat kembalinya sistem ekonomi “persaingan monopolistik” yang lebih menguntungkan segelintir orang/ sekelompok orang/ pengusaha kaya tetapi merugikan sebagian besar golongan kecil ekonomi rakyat. Kebutuhan hidup, *prevalensi* kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus diukur secara kuantitatif, itulah yang sebenarnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. Segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah ekonomi kerakyatan dan segala sesuatu yang tidak meningkatkan ekonomi rakyat harus dilawan. Indonesia sangat tertinggal dari negara ASEAN di dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia menempati posisi paling rendah di ASEAN *Five*

(AIFIS:2015). Namun di dalam hal jumlah gedung tinggi, jumlah orang kaya, Kota Jakarta mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok, di dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia berada paling bawah, nomor 1) Singapura, 2) Malaysia, 3) Thailand (AIFIS:2015).

Peranan ekonomi kerakyatan yang bersumber pada Usaha Kecil dan Menengah diharapkan di masa depan kian strategis dengan semakin pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki motto dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Usaha Kecil dan Menengah yang kokoh dan memiliki daya saing di dalam membangun ekonomi yang kuat akan mampu mensejahterakan anggota dan para pelakunya. Usaha Kecil dan Menengah sangat sesuai dengan gerakan perekonomian rakyat yang berada di dalam UUD, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit usaha yang direkomendasikan berlandaskan kekeluargaan dan bertujuan mensejahterakan masyarakat. Faktanya di dalam masyarakat masih banyak Usaha Kecil dan Menengah yang *kolaps*, karena kurang mampu dalam daya saing, kurangnya inovatif, dan kurangnya pemasaran di dalam menjual produknya.

Ekonomi kerakyatan memang sangat perlu dilakukan demi tercapainya kesejahteraan dan sangat berpengaruh di dalam pemberdayaan masyarakat luas melalui Usaha Kecil, dan Menengah yang sangat berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Malang oleh karena itu sangat perlu mendukung keberlangsungan Usaha Kecil dan Menengah, sehingga kesejahteraan dan pemberdayaan di dalam ekonomi kerakyatan dapat tercapai dengan optimal.

D. Electronic Government

1. Pengertian *E-Government*

E-Government didefinisikan oleh beragam institusi internasional, baik oleh institusi pemerintah atau institusi non-pemerintah. *E-Government* adalah sebuah konsep yang memiliki prinsip-prinsip dasar yang *universal*, namun karena setiap warga negara memiliki skenario dan implementasi atau penerapan yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *E-Government* pun menjadi beraneka macam. Definisi *E-Government* terbagi menjadi kedalam dua ruang lingkup, yaitu dilihat dari sudut institusi non pemerintah dan institusi pemerintah.

E-Government adalah solusi dari kekhawatiran Bank Dunia sebagai lembaga dunia dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan globalisasi seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Bank Dunia mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut: “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of government*”. (World Bank dalam Indrajit, 2002: 2). Berdasarkan definisi yang dikemukakan Bank Dunia, *E-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (*wide area network*, internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang memiliki kemampuan membentuk hubungan dengan warga neraga, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

E-Government is the aplicaation of information and comunication Technology (ICT) by government agencies (Indrajit, 2002:2). *E-Government*

berdasarkan *United Nation Development Programme (UNDP)* merupakan aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan lembaga pemerintahan.

Sementara, Nevada, sebagai salah satu negara bagian dari Amerika Serikat mendefinisikan *E-Government* sebagai :

1. *Online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and businesses from using government services and replace those barriers with convenient access.*
2. *Government operations for internal constituencies that simplify the operational demand of government for both agencies and employees* (Indrajit, 2002:3).

E-Government adalah penggunaan informasi dan teknologi komunikasi untuk memajukan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran biaya, mempermudah pelayanan yang lebih tepat, memungkinkan akses umum yang lebih besar kepada informasi, dan membuat pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab kepada warga negara (Clay G. Weslatt:2007). *E-Government* adalah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik (Bintoro Wardianto, 2010:54).

E-Government In Action di dalam bukunya (2005:5) menguraikan *E-Government* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada *stakeholder* yang ada, misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya.
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik.
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Visi tersebut berasal “Dari, Oleh, dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana *E-Government* tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. *E-Government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Kesimpulan dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa *E-Government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efektif, efisien, dan transparansi. Terdapat pemaparan yang kita dapat dari pengertian *E-Government* diatas, yaitu; Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat untuk mencapai tujuan. agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif dalam penggunaan internet, seluruh prosedur yang berbelit dapat dipangkas.

2. Ruang Lingkup *E-Government*

Konsep Pengembangan *E-Government* disetiap lembaga ditentukan oleh:

1. Tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga
2. Jenis informasi sumberdaya
3. Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga

Hal ini sangat menentukan struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusunan rencana induk dari *E-Government* disetiap lembaga. Jenis layanan yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan prioritas pengembangan *E-Government* suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Citizen (G2C)* dan *Government to Employees (G2E)*. Konsep *E-Government* juga menyangkut *Business to Business*, *Business to Customer*, dan *Customer to Business* (<http://goechi.com/e-Gouvernement.Html>).

a. *Government to Citizens*

Tipe G –to-C ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungan interkasi dengan masyarakat (warga negara). Tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe ini adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian mmbangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan melalui website atau internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah daang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan.

- 2) Kantor Imigrasi membuka situs pendaftaran migrasi bagi warga negara yang ingin membuat *paspor* atau *visa* untuk bekerja, sekolah dan liburan keluar negeri, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan optimal.

b. Government to Bussiness

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar kondisi perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagai mana mestinya. Perusahaan swasta di dalam melakukan aktifitas sehari-hari memerlukan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki pemerintah. Perusahaan swasta juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebuah entiti berorientasi profit, sehingga diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar praktisi bisnis, namun lebih bermanfaat lagi dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

c. Government to Government

Kebutuhan untuk berinteraksi antar negara adalah hal yang sudah menjadi kebutuhan di dalam era globalisasi saat ini, sehingga pemerintah dengan pemerintah yang lainnya setiap hari tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerja sama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan dan lain lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Salah satu contoh penerapan *E-Government* bertipe G-to-G adalah

hubungan administrasi antar kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan besar/konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

d. *Government to Employees*

Applikasi *E-Government* juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:

- 1) Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.
- 2) Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-haknya.
- 3) Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya).

3. Konsep Pengembangan Infrastruktur *E-Government*

Pengembangan *E-Government* di suatu lembaga pemerintah dilandasi oleh empat infrastruktur utama, meliputi:

1. Suprastruktur *E-government* yang memuat kepemimpinan manajemen lembaga (*e-Leadership*), sumber daya manusia (*human resource*) dan

peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan *e-Government (regulation)*.

2. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi, dan keamanan.
3. Infrastruktur informasi antara lain struktur data, format data, metode berbagai data (*data sharing*), dan sistem pengamanannya.
4. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (*interface*), dan aplikasi *backoffice*.

Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan kepada sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama pengembangan *E-Government* secara maksimal. Pengembangan pada setiap lembaga akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Landasan pelaksanaan *E-Government*

E-Government yang dijalankan Diskominfo kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Bab IV Pasal 13 ayat 1 huruf a, b menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi; dan
- b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku nasional,

Kemudian dilanjutkan oleh Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. Pengembangan *E-Government* merupakan solusi bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan.

5. Manfaat Penerapan *E-Government*

Beberapa manfaat dan keuntungan menerapkan *E-Government*:

1. Membuat lingkungan bisnis yang baik
2. Memperkuat tata pemerintahan yang baik dan memperluas jangkauan yang lebih baik kepada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang efisien, efektif, dan akuntabel
4. Informasi dapat diakses 24 jam sehari tanpa harus menunggu dibukanya kantor, dan informasi dapat diakses dimana saja.
5. Meningkatkan hubungan antar pemerintah dan pemerintah, pemerintah dengan warga negara, pemerintah dengan pegawai, dan pemerintah dengan swasta.
6. Meningkatkan produktivitas kerja pemerintahan, karena proses lebih mudah dalam melayani dan mengurangi korupsi.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan, karena partisipasi pada proses pelayanan dan kebutuhan publik dapat dengan mudah terpenuhi.

E. Strategi

1. Pengertian Strategi

Cara yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk mengatasi berbagai tantangan, hambatan, dan kendala dari faktor internal maupun faktor eksternal, maka organisasi perlu menggunakan cara-cara yang tepat dalam menanggulangi

dan mengantisipasinya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Pengertian strategi di dalam beberapa tulisan memiliki arti dan makna yang sama.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep tersebut sangat relevan digunakan pada situasi zaman dahulu ketika seringkali perang terjadi, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat memenangkan peperangan. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep strategi juga sering digunakan pada dunia bisnis, perdagangan, pemasaran, dimana strategi menggambarkan arah yang bisa mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi atau bidang.

Pengertian strategi dari beberapa para ahli (dalam Rangkuti, 2007:3), antara lain sebagai berikut:

- a. Chandler (1962)
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
- b. Learned, Christensen, Andrews dan Guth (1965)
Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- c. Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977)
Strategi merupakan respon yang secara terus menerus maupun adaptif terhadap setiap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Peranan strategi di dalam mencapai tujuan organisasi sangatlah penting. Suatu strategi yang dibuat dengan baik akan menambah kemampuan sebuah organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan suatu kerangka kerja yang fundamental dari sebuah organisasi dimana strategi dapat menjadi pedoman bagi tujuan organisasi dan mengetahui bagaimana cara yang dilakukan dalam tuntutan perubahan lingkungan berdasarkan pertimbangan yang tepat demi tercapainya tujuan organisasi.

2. Tipe dan Jenis Strategi

Seluruh organisasi mempunyai tipe dan jenis yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatannya. Rangkuti (2007:6), pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu :

- a. Strategi Manajemen
Strategi manajemen adalah strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi penerapan harga, inovasi produk, strategi akuisisi dan strategi pemasaran.
- b. Strategi Investasi
Strategi ini merupakan strategi yang berorientasi pada investasi. Misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi pembangunan kembali ke suatu divisi baru strategi divestasi.
- c. Strategi Bisnis
Strategi bisnis sering juga disebut strategi bisnis fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi distribusi atau strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Menurut Nawawi (2005:176-177), banyak teknik-teknik analisis strategi yang digunakan untuk memperoleh jenis-jenis strategi yang dapat diadaptasi dalam organisasi non-profit. Jenis strategi di dalam organisasi non-profit, antara lain:

a. Strategi Agresif

Strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai keunggulan atau prestasi yang ditargetkan.

b. Strategi Konserpatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

c. Strategi Kompetitif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi non-profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya sebagai aparatur pemerintah.

d. Strategi Difensif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.

e. Strategi Diversifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan sebelumnya, atau berbeda dari strategi yang dipergunakan organisasi profit lainnya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan.

f. Strategi Preventif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan.

g. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) agar organisasi non-profit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pemerintahan khususnya di bidang tugas pokok masing-masing, sebagai keunggulan atau prestasi.

F. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1. Pengertian UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah usaha yang sering dikaitkan dengan modal yang terbatas. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya (Hubeis:2009). Tinjauan mengenai definisi tersebut untuk memperoleh pengertian yang sesuai tentang UKM, yaitu ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UKM sendiri diartikan secara terpisah. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menurut pengertiannya sesuai dengan pasal 1 adalah :

- a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Asas dan Tujuan UKM

Asas-asas UKM seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 2 yaitu:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan

i. kesatuann ekonomi nasional

Tujuan dari UKM seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 3 yaitu Usaha Kecil dan Menengah bertujuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya demi membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

3. Kriteria UKM

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti pada pasal 6 juga menyatakan tentang kriteria UKM.

a. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah)

b. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Meiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Susanta (2009:15), kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu:

- a. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang yang dimiliki atau berafiliasi baik secara langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- b. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM) ditambahkan bahwa usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

G. Tekonologi dan Informasi

1. Pengertian Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi berasal dari kata teknologi dan informasi. Teknologi berarti pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Kata teknologi juga berdekatan dengan istilah tata cara. Informasi adalah data yang diproses ke dalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang (Azmi Yan, 2009:2). Menurut McKeown dan dikutip oleh Suyanto (2005:3), teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya.

Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyimpan informasi (Seesar,

2010:6). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ishak (2008:87), teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebenarnya, dan lebih lama penyimpanannya. *Information Technology Association of America* (ITAA) yang dikutip oleh Sutarman (2009:13), “teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer.”

Teknologi informasi bisa disimpulkan bahwa, “teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan dan informasi yang sangat strategis dan membantu di dalam proses pengambilan keputusan.

2. Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Teknologi informasi menjadi sangat penting di dalam sebuah organisasi karena teknologi informasi sebagai alat untuk mendukung sebuah kegiatan organisasi, dan salah satu organisasi yang membutuhkan teknologi informasi adalah sebuah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Penerapan teknologi dan informasi di dalam sebuah organisasi memiliki tujuan yang berbeda di setiap jenis organisasinya dan demi mendukung kepentingan organisasi tersebut. Menurut Sutarman (2009:18) Fungsi Teknologi Informasi ada enam fungsi, yaitu:

1. Menangkap (*Capture*)

2. Mengolah (*Processing*)

Mengompilasikan catatan rinci dari aktifitas, misalnya menerima input dari *keyboard*, *scanner*, *mic* dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan), segala bentuk data dan informasi.

- a. *Data Processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi
- b. *Information processing*, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe atau bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe atau bentuk yang lain dari informasi.
- c. *Multimedia system*, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe atau bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan)

3. Menghasilkan (*Generating*)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya : laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.

4. Menyimpan (*Storage*)

Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke *harddisk*, *tape*, *disket*, *compact disc (CD)* dan sebagainya.

5. Mencari Kembali (*Retrieval*)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya.

6. Transmisi (*Transmission*)

Mengirimkan data dan informasi dari lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya dan sebagainya. Semua pernyataan di atas menunjukkan bahwa, teknologi dan informasi mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda bagi suatu organisasi tergantung pada bidangnya masing-masing.

3. Komponen-Komponen Teknologi dan Informasi

Komponen teknologi informasi merupakan sub sistem yang terbentuk karena penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari tiga komponen utama (Seesar, 2010:6) yaitu:

a. Perangkat keras (*hardware*)

Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya : monitor, keyboard, printer, harddisk, memori, mikroprosesor, CD-ROM, mouse, kabel jaringan, CPU, antenna telekomunikasi, dan peralatan I/O.

b. Perangkat lunak (*software*)

Merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer.

Perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- Perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya : Sistem Operasi *Window*, *Linux*, *Unix*, *OS/2*, dan *FreeBSD*
- Perangkat lunak bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Misalnya: *Visual Basic*, *Delphi*, *Turbo C*, *Fortran*, *Cobol*, *Turbo Assembler*, dan *Java*.
- Perangkat lunak aplikasi, merupakan program jadi siap pakai yang dibuat untuk keperluan khusus. Misalnya: *Jet Audio*, *Windows Media Player*, *Real Player* untuk keperluan aplikasi perkantoran : *Microsoft Office* dan *Open Office* yang terdiri dari beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data dan presentasi.

c. Manusia (*brainware*)

Manusia merupakan personel-personel yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti Sistem Analis, *Web Master*, *Web Designer*, *Animator*, *Programmer*, *Operator*, *User* dan lain lain. Berbagai peran yang dapat dilakukan manusia di dalam bagian sistem komputer, yaitu:

- *Analisis sistem*, berperan melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer.
- *Programmer*, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analis

kedalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan komputer.

- Operator berfungsi menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan.
- Teknisi, bertugas merakit/memelihara perangkat keras komputer, dll

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen teknologi informasi terdiri satu kesatuan yang saling berkaitan dan ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan sebuah sistem.

4. Peran Teknologi Informasi Bagi Organisasi

Peranan teknologi informasi bagi organisasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat dan akurat serta menciptakan produk layanan yang inovatif sebagai bentuk meningkatkan daya saing untuk menghadapi kompetisi pasar.

Teknologi informasi juga berperan penting di dalam organisasi untuk mengefisiensi waktu dan biaya dalam jangka panjang yang akan memberikan keuntungan ekonomis yang tinggi. Penerapan teknologi dan informasi pada setiap perusahaan/organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah mendukung kepentingan usahanya. Persaingan dan fluktuasi dunia bisnis yang tinggi sehingga penerapan TI bukan hanya sebagai *supporting tools* saja, tetapi menjadi *strategic tools*, dimana fungsi dan perannya lebih komprehensif dan lebih luas terkait pada visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi.

Peran teknologi informasi bagi suatu organisasi dapat dilihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry yang dikutip oleh Perdana (2009:3), ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di suatu organisasi, yaitu:

1. Fungsi Operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi, karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai *supporting agency*, dimana teknologi informasi dianggap sebagai *firm infrastructure*.

2. Fungsi *Monitoring and Control*

Fungsi *Monitoring and Control* mengandung arti, bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktifitas di level *manajerial embedded* di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus memiliki *span of control* atau *peer relationship* yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di organisasi terkait.

3. Fungsi *Planning and Decision*

Fungsi *Planning and Decision* mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis, karena keberadaannya sebagai *enabler* dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah *knowledge generator* bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Organisasi yang berbentuk Usaha

Kecil Menengah pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan dan atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut.

4. Fungsi *Communication*

Fungsi *Communication* secara prinsip termasuk ke dalam *firm infrastructure* dalam era organisasi modern dimana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi.

5. Fungsi *Interorganisasional*

Fungsi *interorganisasional* merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa organisasi untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan organisasi lain. Konsep kemitraan strategis atau *partnerships* berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi *Supply Chain Management* atau *Enterprise Resource Planning* membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya. Organisasi tidak jarang yang cenderung melakukan kegiatan pengalihdayaan atau *outsourcing* sejumlah proses bisnis terkait dengan manajemen teknologi informasinya ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya.

Kesimpulan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, berperan di dalam beberapa fungsi yaitu; fungsi operasional, fungsi monitoring, fungsi kontrol, fungsi *planning and decision*, fungsi *communication*, dan fungsi interorganisasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan suatu masalah atau *problem statement* tertentu. Pemecahannya dapat berupa jawaban atas sesuatu masalah, atau untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel yang menjadi fokus suatu penelitian (Zuhriah, 2009: 1). Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi. Gunawan (2014: 80) mengungkapkan penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat (Wardiyanta, 2006: 5)

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memaparkan secara lebih mendalam dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena hasil penelitian. Hasil penelitian nantinya akan dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Maka dari itu peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi secara mendalam, jelas, terinci yang sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dalam merumuskan masalah melalui fokus, *pertama*, penetapan fokus akan membatasi studi. Jika dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. *Kedua*, penetapan fokus berfungsi memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk keluar (*inclusion-exclusion*) suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan dipastikan sewaktu penelitian sudah diarena atau lapangan penelitian. Meskipun suatu penelitian telah memiliki rumusan masalah yang baik dan telah dirumuskan atas dasar teoritis dan ditunjang pengalaman, akan ada suatu situasi yang tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah tersebut (Moleong, 2014; 93-95).

Penetapan fokus oleh peneliti, dalam hal ini didasarkan atas pertimbangan normatif dan teoritis. Sebagaimana dalam menentukan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi memerlukan strategi yang tepat. Peneliti melihat strategi tersebut, berdasarkan telaah teori dari Nawawi (2005:176-177), banyak teknik-teknik analisis strategi yang digunakan untuk memperoleh jenis-jenis strategi yang dapat diadaptasi dalam organisasi non-profit. Fokus Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi yaitu:
 - h. Strategi Agresif

Strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai keunggulan atau prestasi yang ditargetkan.

i. Strategi Konservatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

j. Strategi Kompetitif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi non-profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya sebagai aparatur pemerintah.

k. Strategi Defensif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.

l. Strategi Diversifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan sebelumnya, atau berbeda dari

strategi yang dipergunakan organisasi profit lainnya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan.

m. Strategi Preventif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan.

n. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) agar organisasi non-profit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pemerintahan khususnya di bidang tugas pokok masing-masing, sebagai keunggulan atau prestasi.

2. Tantangan strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbasis teknologi informasi
 - a. Tantangan Internal
 - b. Tantangan Eksternal
3. Rekayasa teknologi di dalam mengoptimalkan strategi pemerintah daerah di dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak atau tempat peneliti menuangkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian berhubungan

dengan keseluruhan wilayah atau daerah tempat fenomena atau peristiwa dapat ditangkap. Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Malang. Peneliti memilih Kota Malang karena Kota Malang merupakan salah satu kota yang mempunyai Usaha Kecil Menengah (UKM) yang unggul dibandingkan dengan kota sekitarnya. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang unggul tersebutlah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Pemilihan lokasi dan situs penelitian adalah didasarkan pada aspek kemudahan dalam akses informasi.

Situs Penelitian merupakan tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data atau informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut maka situs penelitian pada penelitian ini adalah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menjadi situs penelitian bagi peneliti karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang merupakan dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal menangani masalah Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pemilihan lokasi penelitian dan situs penelitian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, peneliti memperoleh informasi yang tepat dan mendalam, valid, akurat, jelas, rinci, serta benar-benar dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan faktor kunci yang dijadikan sumber informasi sebagai bahan kajian penelitian. Data-data yang diperoleh harus menggambarkan

fenomena penelitian secara jelas dan mendalam. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni asli, informasi dari tangan pertama atau responden (Wardiyanta, 2006; 28). Data Primer diperoleh langsung dari sumbernya (fenomena), dengan metode utama melalui wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, tetapi dari pihak ketiga (Wardiyanta, 2006; 28). Data sekunder merupakan data pendukung realitas penelitian, sehingga keabsahan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Data sekunder diperoleh tidak secara langsung dalam proses penelitian lapangan, melainkan diperoleh dari dokumen, laporan, dan data-data pendukung lain dari situs penelitian yang mendukung pengembangan penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, sehingga harus diambil dari situs yang tepat.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Informan

Informan adalah narasumber yang mengetahui dan menguasai mengenai fenomena penelitian. Informan yang nantinya akan mendukung penelitian dengan judul Strategi Pemerintah

Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi antara lain:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

| No. | Instansi | Jabatan |
|-----|--|---|
| 1. | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang | 1. Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang |
| 2. | Pemilik UKM | 1. Amangtiwi 2. AMR 3. Komunitas Rajut Malang 4. Alun-Alun Kuliner |

Sumber: Data diolah Peneliti

2. Peristiwa

Suatu penelitian selalu didasarkan pada peristiwa atau fenomena sebagai pokok permasalahan, sehingga pemilihan fenomena adalah faktor utama dalam sebuah penelitian. Hakikatnya fenomena yang telah dipilih itulah yang nantinya akan dicari atau digali oleh peneliti ketika proses pengumpulan data. Karena fenomena itu melekat dengan subjek yang diteliti, maka jumlah subjek penelitian pun terus bertambah sampai tidak ditemukan lagi informasi baru yang diungkap oleh beberapa objek yang terakhir (Gunawan, 2014: 206). Sehingga dalam penelitian judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya subjek (situs penelitian), disesuaikan dengan fenomena yang sedang berlangsung (*life history*).

3. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu sumber penting dalam mendukung penumpulan data, realitas penelitian harus sinkron dengan data (dokumen) yang berkaitan dengan fenomena. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan meliputi buku, Undang-Undang, pemberitaan, arsip, laporan, dan data lain yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti dan memuat informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai langkah dalam memperoleh data penelitian. Peneliti harus memahami terlebih dahulu teknik pengumpulan data agar memperoleh data sesuai harapan. Teknik pengumpulan data antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dengan kata lain pengamatan adalah pengumpulan data secara langsung melalui pengamatan fenomena yang sedang berlangsung, sehingga peneliti akan dapat membandingkan antara konsep (teoritis maupun kebijakan) dengan realitas yang ada.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data langsung dari narasumber yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Pemilihan narasumber sangat penting memperhatikan kapasitas narasumber sebagai sumber informasi utama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis yang berada pada situs penelitian dan berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen sangat diperlukan untuk mendukung keabsahan data lapangan.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran data penelitian dapat diperoleh dengan membandingkan antara konsep (kebijakan) dengan realitas yang sedang berkembang. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti antara lain:

1. Peneliti Sendiri (*Human Instrument*)

Instrumen pengumpul data penelitian adalah peneliti sendiri. Seorang peneliti selalu mempertanyakan secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti agar informasi yang didapatkan dapat mendukung penelitian.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

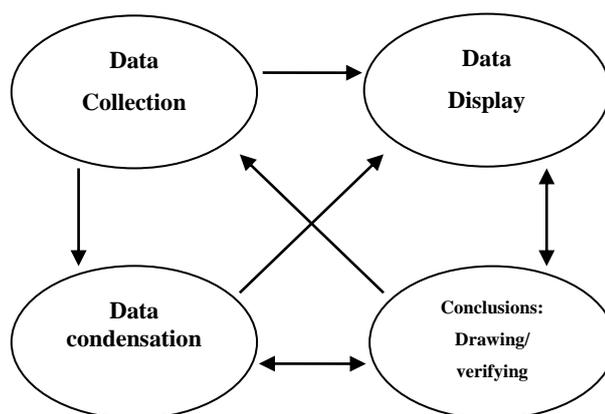
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, seorang peneliti harus mempertanyakan perihal fenomenayang sedang diteliti kepada narasumber yang relevan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang dibutuhkan.

3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Proses pengumpulan data berupa wawancara dan observasi secara tidak disengaja dan tiba-tiba, selalu memunculkan fakta baru berkaitan dengan fenomena yang diteliti, sehingga seorang peneliti harus menyediakan catatan lapangan, berupa alat tulis/alat lain yang dapat digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Serangkaian kegiatan ini, data kualitatif dapat disederhanakan untuk mempermudah pemahaman (Gunawan, 2014:209). Analisis data kualitatif lebih tepat dilakukan jika data yang digunakan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak disusun dalam struktur klasifikatoris. Analisis data pada dasarnya adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi (Wardiyanta, 2006:37). Miles, Huberman dan Saldana (2014:8) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*drawing and verification conclusion*). Berikut penjelasan ketiga tahap analisis data (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14):



Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
 Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau transformasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen dan data dari lapangan lainnya. Penelitian ini memiliki cakupan masalah yang cukup kompleks, bukan hanya politik, melainkan sosial dan ekonomi, sehingga sangat perlu tahap-tahap penyederhanaan melalui coding data untuk mempermudah pemilahan kedalam sub-sub tema penelitian. Tidak kalah penting adalah pemilihan dan pemusatan data, dimana pemilihan pengambilan data harus sesuai dengan judul penelitian dan terpusat pada studi yang dilakukan, sehingga rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam fokus akan terjawab dengan maksimal.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan informasi yang memungkinkan dalam penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data bertujuan mempermudah peneliti dalam melihat dan memaknai fenomena yang sedang terjadi, menganalisis serta merencanakan program selanjutnya berdasarkan pemahamannya. Sebagaimana penjelasan diatas, setelah pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan data, sangat perlu menyajikan data sesuai dengan sub-sub tema yang telah sederhanakan dalam tahap awal, sehingga akan dapat dianalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil

Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi yang nantinya akan mempermudah dalam menganalisis. Bila dua tahapan awal dilaksanakan dengan baik, maka akan mudah dalam penarikan kesimpulan. Kemudian dari data yang telah diperoleh, peneliti akan menarasikan atau mendeskripsikan secara detail berdasarkan data dan hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian ini peneliti akan lebih banyak menggunakan narasi dalam penyajian data karena di dalam penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

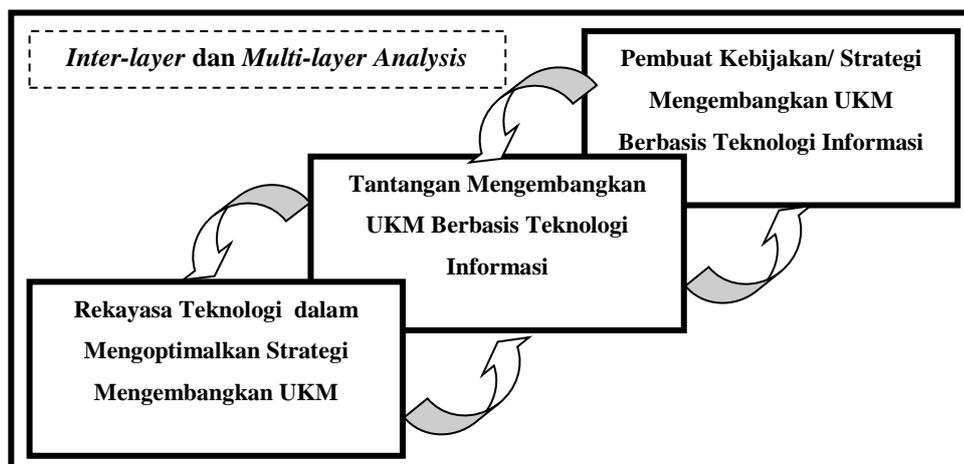
3. *Drawing and Verification Conclusion*

Langkah terakhir dalam penulisan penelitian analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai untuk mencari arti dan makna-makna benda, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan pada data yang didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan awal yang didapatkan hanya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Akan tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Setelah peneliti melakukan kondensasi data dan penyajian data maka peneliti akan memperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan. Peneliti membuat suatu kesimpulan

berdasarkan pada data dan bukti yang jelas dan valid setelah peneliti melakukan penelitian. Kesimpulan yang diambil nantinya merupakan kesimpulan dari hasil penyajian data dan pembahasan kemudian barulah menarik kesimpulan.

Penelitian dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi merupakan penelitian dengan masalah yang cukup kompleks, meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Masing-masing aspek saling mempengaruhi, sehingga peneliti menggunakan analisis Miles and Hubberman yang merupakan penelitian model interaktif. Peneliti berusaha untuk mencapai kesimpulan dengan cara menghubungkan masing-masing aspek, sehingga semua permasalahan dapat terjawab.

Selain menggunakan teknik analisis data model interaktif, peneliti juga menggunakan model teoritik alternatif (Sarwono, 2008). Model teoritik alternatif merupakan model analisis kebijakan deliberatif mengakomodasikan nilai, preferensi dan predisposisi warga negara yang bernegasi dengan model kebijakan publik yang linier. Memerlukan analisis *frame* yang lahir dari diskursus dan pengembangan hipotesis kerja sehingga menimbulkan *multi-layers* dan *inter-layers analysis* (Sarwono, 2008). Berikut merupakan *inter-layer* dan *multi-layer analysis* yang peneliti buat sesuai dengan bahasan dan rumusan masalah dari peneliti itu sendiri:



Gambar 4. Inter-layer dan Multi-layer Analysis

Sumber: Diolah Peneliti

H. Keabsahan Data

Data yang telah terkumpul adalah modal awal dalam penelitian, dari data yang terkumpul maka dapat dilakukan analisis sebagai bahan masukan dan kesimpulan penelitian. Penelitian Kualitatif harus berusaha mendapatkan data yang valid melalui pemeriksaan data. Gunawan (2013;217-218) mengungkapkan bahwa sebagai analisis data perlu menggunakan triangulasi data. Triangulasi merupakan penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan drajat kepercayaan (Kredibilitas/Validitas) dan Konsistensi (reliabilitas data), serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data dilapangan. Argumen Gunawan (2013) diperkuat oleh pendapat Patton (1987) dikutip oleh Moleong (2014; 330-331) yang menyatakan bahwa triangulasi adalah membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dilanjutkan oleh Moleong bahwa drajat kepercayaan suatu informasi dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat; dan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

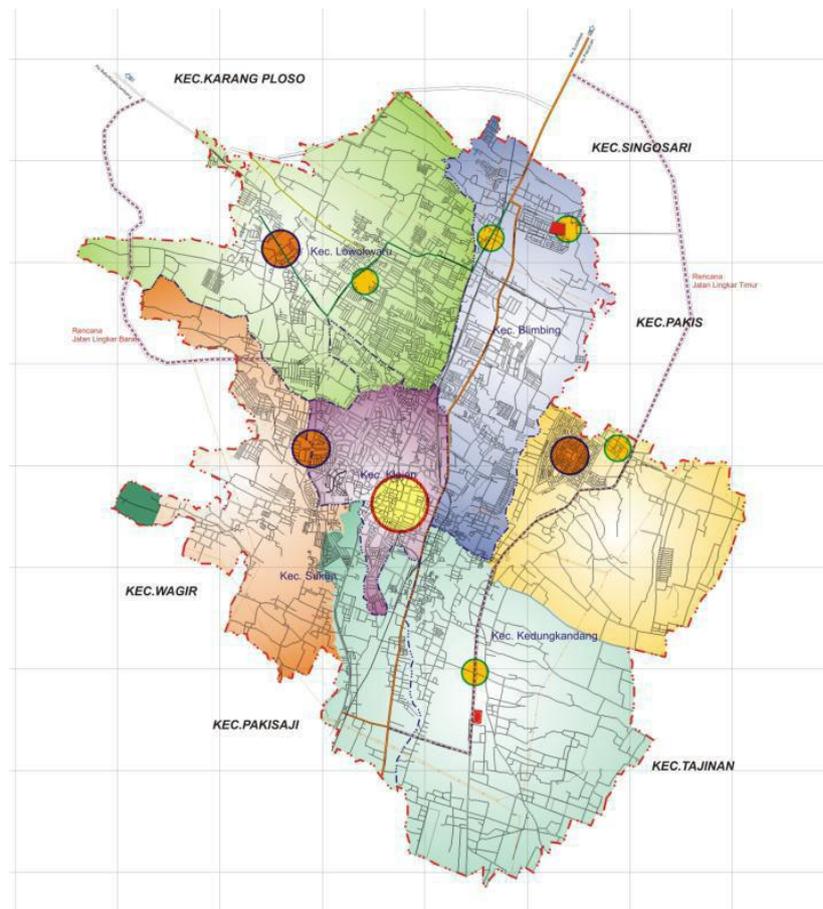
a) Sejarah Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang berkembang dan mulai tumbuh ketika hadirnya pemerintah kolonial Belanda, ketika dimulainya pengoperasian jalur kereta api pada tahun 1879 . Masyarakatpun semakin tinggi mobilisasinya dan semakin meningkat pula kebutuhan akan ruang gerak melakukan kegiatan sehari-hari. Perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun tanpa dapat terkontrol dengan baik merupakan salah satu perubahan yang terjadi. Faktor perubahan tersebut akibat mulai dioperasikannya jalur kereta api tersebut, perubahan yang terjadi adalah peralihan fungsi lahan, fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri (Dikutip dari laman <http://bappeda.malangkota.go.id> tanggal 25 Juli 2017 pukul 13.23).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, mobilisasi masyarakat yang semakin meningkat, pemahaman kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan akan menjadi modal dasar yang kuat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berkualitas. Pengertian ini dapat diperoleh dari data-data mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat adalah mengkaji tentang tingkat

perkonomian dan sosial masyarakat dalam suatu daerah. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran tentang jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, serta aspek daya saing daerah merupakan aspek yang menjelaskan tentang kemampuan-kemampuan lebih atau kelebihan daerah tersebut yang dapat menjadi nilai jual dan nilai tambah ekonomis suatu daerah dan dapat menjadi acuan secara relatif terhadap wilayah lain.

b) Kondisi Geografi dan Demografi Kota Malang



Gambar 5 : Peta Kota Malang

Sumber : <http://bapeddamalangkota.go.id>

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06^o – 112,07^o Bujur Timur dan 7,06^o – 8,02^o Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km². Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- 3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan tumpang Kabupaten Malang.

Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan yang terbagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4071 Rukun Tetangga (RT) (Dikutip dari <http://bappeda.malangkota.go.id> pada tanggal 6 Agustus pukul 11.20 WIB).

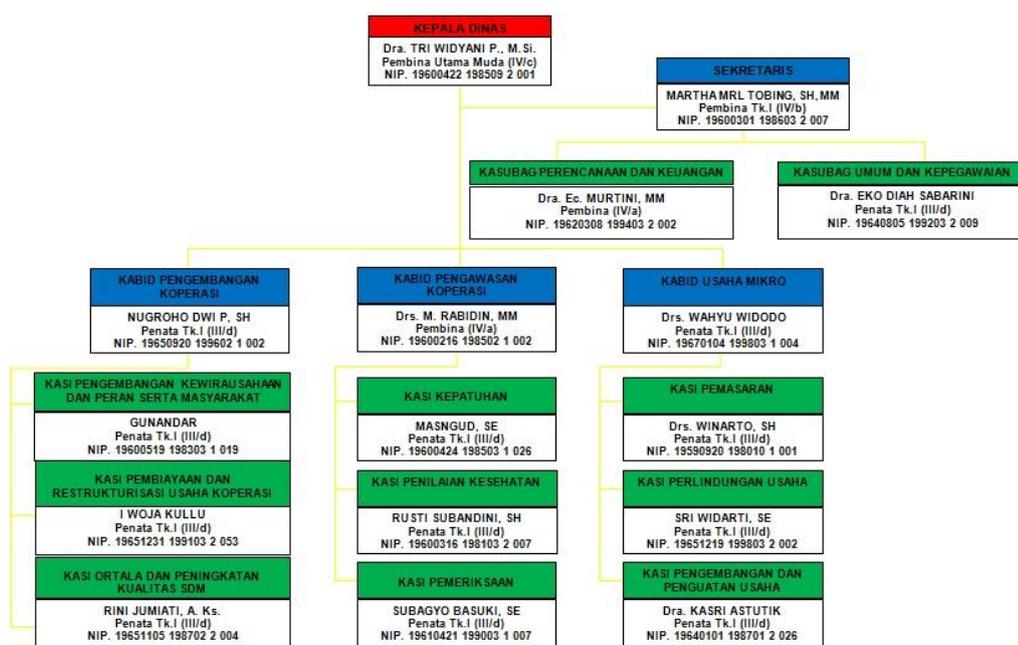
2) Karakteristik Demografi

Berdasarkan data-data yang dirilis oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam laman <http://dispendukcapil.malangkota.go.id> , jumlah penduduk Kota Malang *stagnan* pada tahun 2015 ke tahun 2016 dan mengalami peningkatan hingga data tersebut terakhir *up to date* Juli 2017. Jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2015 hingga tahun 2016 secara berurutan adalah Tahun 2015 sebanyak 881.794 jiwa, Tahun 2016 sebanyak 881.794 jiwa, dan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 900.468 jiwa.

Jumlah penduduk jika dikelompokkan menurut umur Tahun 2017, bahwa kelompok umur pada usia produktif pada tahun 2017 (15-64) sangat tinggi (634.634 jiwa), sehingga ini bisa menjadi modal dasar untuk memicu produktifitas kota. Kelompok umur dengan jumlah paling banyak adalah di usia 35-39 tahun, yaitu hingga mencapai sebesar 79.685 jiwa pada tahun 2017. Komposisi penduduk menurut kelompok umur hampir tidak mengalami perubahan. Kelompok umur muda dari usia 0 hingga 14 tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena tingkat regenerasi yang sangat baik dan dapat mendukung produktifitas daerah.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

a. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang



Gambar 6 : Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2017

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, dimana struktur organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Penyusunan Program
 - Subbagian Keuangan

- Subbagian Umum
 1. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
 - Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum
 - Seksi Pengembangan
 - Seksi Pengawasan
 2. Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Koperasi
 2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
 3. Seksi Usaha Simpan Pinjam
 3. Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 4. Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha
 5. Seksi Pengembangan Kewirausahaan
 6. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis
 4. UPT
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah terwujudnya koperasi dan Usaha Mikro sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam

melakukan aktifitas dan interaksinya melalui perencanaan program yang ada.

Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;
2. Memberdayakan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan;
3. Memfasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan UKM melalui pengembangan pembiayaan ;
4. Meningkatkan peran koperasi dan UKM untuk memperkuat struktur perekonomian daerah ;

Tujuan merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang lebih Spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program Kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana Sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya koperasi yang berkualitas sesuai jati dirinya
- b. Terwujudnya UKM yang profesional

Berikut merupakan gambar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang bertempat di Jl. Raden Panji Suroso No. 18 Malang :



Gambar 7 : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang
Sumber : Dokumen Pribadi

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
7. pelaksanaan urusan rumah tangga;
8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
12. pengelolaan anggaran;
13. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
14. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
15. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

19. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
20. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
21. pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Penyusunan Program
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Umum

Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Tugas pokok Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

5. Penyusunan sistem informasi koperasi dan usaha kecil dan menengah
6. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan
7. Pelaksanaan validasi dan pengelolaan data Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
9. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
10. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
11. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Pelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan
3. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan

4. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran
5. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
6. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai
7. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah
8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
2. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
3. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
5. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Kelembagaan Koperasi

Melaksanakan tugas pokok pembinaan kelembagaan dan sumber daya koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan kelembagaan dan sumber daya koperasi
2. Pelaksanaan pelayanan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum koperasi kepada masyarakat
3. Pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran dan pengesahan badan hukum koperasi, pengembangan organisasi, penelaahan peraturan perundang-undangan
4. Pelaksanaan bantuan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi
5. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan koperasi
7. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kader koperasi serta kewirausahaan
8. Pelaksanaan kerja sama antar koperasi serta dengan badan usaha lain
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kelembagaan koperasi
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
11. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai TUPOKSI

3. Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi

Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi melaksanakan tugas pokok pembinaan koperasi di bidang usaha dan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan koperasi di bidang usaha dan jasa keuangan
2. Pelaksanaan penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha
4. Pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan koperasi di bidang pembiayaan dan jasa keuangan
5. Pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan koperasi di bidang pengendalian simpan pinjam
6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pembinaan koperasi di bidang usaha dan jasa keuangan
8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

9. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai TUPOKSI

4. Bidang Usaha Kecil Menengah

Bidang Usaha Kecil Menengah melaksanakan tugas pokok kebijakan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah. Pelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Kecil Menengah memiliki fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah
2. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan pengusaha kecil dan menengah
3. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerja sama antara koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah
5. Pengawasan terhadap pengembangan kerja sama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen pengusaha kecil dan menengah
6. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang UKM
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
8. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai TUPOKSI

Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha
2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan
3. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis

Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha melaksanakan tugas pokok pengembangan kerja sama pengusaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengembangan kerja sama pengusaha kecil dan menengah
2. Pelaksanaan bimbingan pengembangan kelembagaan pengusaha kecil dan menengah dan fasilitasi kerja sama antara pengusaha kecil dan menengah dengan pihak swasta, BUMN dan BUMD
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengusaha kecil dan menengah
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
5. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pengembangan Kewirausahaan melaksanakan tugas pokok pengembangan, pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengembangan kewirausahaan

2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan
3. Pelaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan
4. Pelaksanaan upaya pengembangan wirausaha baru
5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
6. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pengembangan Informasi Bisnis melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengembangan Informasi Bisnis mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah
3. Pelaksanaan pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah
4. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah
5. Pendistribusian informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan bisnis pengusaha kecil dan menengah
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
8. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mempunyai galeri UKM yang terletak pada Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, hal ini sebagai ajang promosi kepada masyarakat bahwa UKM benar-benar berjalan dan terdapat output yang dihasilkan.



Gambar 8 : Galeri UKM pada Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Sumber : Dokumen Pribadi

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi

a. Strategi Agresif

Strategi agresif merupakan strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai keunggulan atau prestasi yang ditargetkan (Nawawi, 2005). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tentunya mempunyai strategi agresif guna mencapai visi dan misi yang telah ditargetkan. Strategi agresif yang diterapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yaitu dengan melakukan revitalisasi terhadap UKM yang tidak sehat. Permasalahan yang sering muncul pada UKM adalah masalah penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan kepindahan alamat UKM tanpa adanya konfirmasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Dalam upaya merevitalisasi UKM-UKM yang tidak sehat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menerapkan strategi agresif dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah untuk mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai target. Dengan melakukan revitalisasi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mendobrak penghalang dari UKM yang tidak sehat dan bertujuan untuk membangkitkan lagi UKM tersebut.

Jumlah UKM di Kota Malang tahun 2017 sebanyak 767 dan hanya 467 UKM di antaranya yang masih aktif, sedangkan sisanya termasuk dalam kategori sakit. UKM yang disebut sakit yaitu UKM yang tidak menjalankan rapat tahunan anggota hingga tidak membuat laporan neraca keuangan dan asetnya. Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang akan melakukan pendataan ulang adanya UKM yang masih produktif dan mempunyai potensi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Jumlah UKM yang tidak sehat di Kota Malang ternyata masih cukup banyak. Dari total 767 UKM yang ada di Kota Malang, 300 UKM diantaranya masih dinyatakan tidak sehat, dan 467 masih dinyatakan sehat. Jadi ada sejumlah faktor yang membuat UKM dinyatakan tidak sehat. Tidak sehat salah satunya karena pengurus dan anggota UKM nya bermasalah. Indikasi koperasi tidak sehat juga dilihat dari keberadaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jika selama dua tahun berturut-turut UKM tidak melakukan RAT, maka UKM itu sudah pasti tidak sehat. Untuk mengurangi jumlah UKM tidak sehat, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang terus melakukan pembinaan pengelolaan manajemen koperasi, pihak dinas juga mendatangi paguyuban UKM tersebut untuk melihat sejauh mana badan hukumnya.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Wawancara tersebut peneliti dokumentasikan dalam bentuk gambar yaitu sebagai berikut :



Gambar 9 : Wawancara bersama Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Sumber : Dokumen Pribadi

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Eko, selaku ketua paguyuban AMR. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sudah mendatangi paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Malang guna membina pengelolaan manajemen koperasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko selaku Ketua Paguyuban AMR Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Kami sebagai anggota paguyuban UKM Kota Malang berupaya terus mengembangkan produk-produk unggulan supaya UKM ini tidak mati, banyak sekali UKM yang baru berdiri tapi sudah kukut karena mereka mudah menyerah dan sulit diajak berkembang. Untuk mendirikan UKM juga membutuhkan badan hukum, mas. Sebagian masyarakat juga belum mengetahui bagaimana mendirikan badan hukum suatu UKM, di sisi lain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga telah mendatangi paguyuban guna memberikan sosialisasi terkait badan hukum UKM sehingga mempermudah kita dalam mengelola UKM.” (wawancara tanggal 5 September 2017, pukul 14.00 WIB di Rumah Bapak Eko)

Dalam menetapkan strategi agresif, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mempunyai perumusan rencana strategik dalam mendobrak penghalang, rintangan, dan ancaman untuk mencapai target dari keberhasilan UKM yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang sebagai berikut :
 - a) Mengoptimalkan SDM aparatur untuk memfasilitasi pengembangan UKM;
 - b) Sosialisasi kebutuhan program UKM kepada pemerintah kota untuk meningkatkan dukungan pembiayaan;
 - c) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan usaha UKM;
 - d) Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi;
 - e) Menyusun program pembangunan koperasi dan yang sinergis lintas instansi.
2. Kekuatan yang ada untuk menekan ancaman sebagai berikut:
 - a) Mengadakan diklat UKM;
 - b) Mengadakan diklat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
 - c) Menciptakan kegiatan untuk meningkatkan PAD;
 - d) Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam pembinaan perkoperasian;
 - e) Mengkomunikasikan ide *stakeholder* dan diakomodasikan dalam program pembangunan UKM.
3. Peluang yang dimiliki untuk mendorong kelemahan antara lain :
 - a) Meningkatkan kemampuan SDM (diklat, dan rotasi pegawai);

- b) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada;
- c) Mengumpulkan dan mengolah data informasi UKM;
- d) Mengusulkan penambahan perbaikan peralatan kantor;
- e) Menerapkan sistem pemberian penghargaan pada pegawai yang berprestasi dan pemberian teguran pada pegawai yang lalai dalam tugas.

4. Menekan kelemahan dan ancaman sebagai berikut :

- a) Mengkaji dan mengidentifikasi terjadinya permasalahan dan kebutuhan UKM;
- b) Sosialisasi peran UKM dalam masyarakat;
- c) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Perumusan rencana strategik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang didasarkan pada faktor internal, faktor eksternal, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Adapun faktor internal, faktor eksternal, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perumusan Rencana Strategik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

| | | |
|------------------------|---|---|
| FAKTOR INTERNAL | <u>KEKUATAN :</u> - Tersedianya SDM aparatur Pembina Koperasi dan UKM yang cukup; | <u>KELEMAHAN :</u> - Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama; - Terbatasnya jumlah |
|------------------------|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>FAKTOR EKSTERNAL</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana Dinas yang memadai; - Adanya Perda No. 9 Tahun 2000; - Adanya sasaran binaan Koperasi dan UKM di Kota Malang. | <p>sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum dimilikinya basis data Koperasi- - Dan UKM yang komprehensif; - Belum optimalnya kinerja aparat Pembina sesuai dengan tupoksinya. |
| <p><u>PELUANG:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Potensi Koperasi dan UKM yang berperan dalam mengatasi krisis Ekonomi; - Adanya PP 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi; - Komitmen pengembangan sistem ekonomi kerakyatan | <p><u>STRATEGI SO :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan SDM aparatur untuk memfasilitasi pengembangan Koperasi dan UKM; - Sosialisasi kebutuhan program Koperasi dan UKM kepada Pemerintah Kota; - Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi; - Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi; - Menyusun Program Pembangunan Koperasi yang sinergis Lintas Instansi. | <p><u>STRATEGI WO :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan SDM melalui diklat, dan rotasi Pegawai; - Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada; - Mengumpulkan dan mengolah data informasi Koperasi UKM dan ; - Mengusulkan penambahan perbaikan peralatan kantor; - Menerapkan sistem pemberian penghargaan pada pegawai yang berprestasi dan pemberian teguran pada pegawai yang lalai dalam tugas. |
| <p><u>ANCAMAN :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak meratanya respon Pengelola Koperasidan UKM terhadap program inovatif; - Adanya Perpu yang kurang mendukung; - Adanya Koperasi yang kurang | <p><u>STRATEGI ST :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan diklat Perkoperasian; - Mengadakan diklat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan; - Menciptakan kegiatan untuk meningkatkan PAD; - Mengintensifkan | <p><u>STRATEGI WT :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji dan mengidentifikasi terjadinya permasalahan dan kebutuhan Koperasi dan UKM; - Sosialisasi peran Koperasi dan UKM dalam masyarakat; |

| | | |
|---|---|---|
| <p>memiliki jiwa kewirausahaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran <i>Stakeholder</i> dalam pembangunan Koperasi dan UKM belum terakomodasi; - Adanya Koperasi yang berkembang tdk sesuai dengan jatidiri koperasi. | <p>koordinasi dan komunikasi dengan Instansi Terkait dalam pembinaan Perkoperasianan dan UKM;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkomunikasikan ide <i>stakeholder</i> dan diakomodasikan dalam program pembangunan Koperasi. | <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan koordinasi dengan Instansi Terkait dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan. |
|---|---|---|

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

b. Strategi Konservatif

Strategi Konservatif merupakan strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membuat strategi konserpatif ini dengan membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Kebijakan merupakan pedoman untuk pelaksana tindakan-tindakan organisasi yang ditetapkan berdasarkan pandangan komitmen berupa ketentuan yang disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan sehingga Sasaran, Tujuan Visi dan Misi Organisasi dapat tercapai. Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah terwujudnya koperasi dan Usaha Mikro sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan

dalam perekonomian daerah. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;
2. Memberdayakan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan;
3. Memfasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan UKM melalui pengembangan pembiayaan ;
4. Meningkatkan peran koperasi dan UKM untuk memperkuat struktur perekonomian daerah

Kebijakan juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis realistis, rasional dan komprehensif secara menyeluruh dan terpadu yang menjadi faktor penting bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta lingkungan yang dihadapi kemudian dituangkan dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Malang sebagai sebagai bentuk dari strategi konserpatif dijabarkan melalui kebijakan internal dan kebijakan eksternal sebagai berikut:

1. Kebijakan internal, yaitu mencakup segala upaya guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang agar

mempunyai kemampuan (*capable*) sesuai bidangnya masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal dan optimal. Contoh dari kebijakan internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan berupa: Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan bantuan sarana dan penyediaan Modal bagi UKM. Selain itu, produk hasil penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, salah satunya ditempatkan pada galeri UKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebagai bahan promosi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mendorong pertumbuhan usaha mikro lewat sejumlah pelatihan, berbagai upaya dilakukan agar gerak perekonomian melalui usaha mikro bisa mengalami kenaikan yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk menggerakkan pertumbuhan UKM dilakukan cara melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha yang bergerak di dalamnya. Contohnya yaitu Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Usaha Mikro Masyarakat di Hotel Sahid Montana Malang pada tanggal 8 Agustus 2017. Pelatihan yang dilakukan selama tiga hari dari tanggal 8-10 Agustus ini difokuskan pada pelatihan bidang kain perca dan melukis kain. Potensi usaha mikro sangat besar karena Malang saat ini sudah tenar sebagai kota wisata dan pendidikan. Pelatihan tidak sekadar melaksanakan pelatihan lalu selesai namun harapannya ada inovasi dan kreatifitas yang lahir, dengan adanya pelatihan ini para pelaku usaha

bisa menangkap peluang yang ada sehingga pertumbuhan usaha kecil bisa membawa dampak positif bagi masyarakat.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Realisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Malang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan, Alokasi Dana dan Realisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2016

| NO | Program/ Kegiatan | ALOKASI DANA | | Realisasi Penggunaan Perkegiatan (Rp) | Persentase Rencana Tingkat Kecapaian (Target) Penyerapan Sesuai SPMU (%) |
|---|---|--------------|---|--|--|
| | | Sumber | Rencana Capaian (Tingkat) Jumlah (Rp) | | |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | DPP | 3.000.000 | 2.970.000 | 99,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | DPP | 37.000.000 | 26.674.130 | 72,09 |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | DPP | 36,800,000 | 33.780.900 | 91,80 |
| 4 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | DPP | 3.690.000 | 3.690.000 | 100,00 |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | DPP | 34.424.000 | 22.413.800 | 65,11 |
| 6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | DPP | 30.000.000 | 23.126.800 | 77,09 |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | DPP | 5.500.000 | 3.712.750 | 67,50 |

| | | | | | |
|---|--|-----|-------------|-------------|--------|
| | kantor | | | | |
| 8 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | DPP | 74.705.000 | 74.195.000 | 99,32 |
| 9 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU-an | DPP | 10.000.000 | 9.625.000 | 96,25 |
| 10 | Penyediaan makanan dan minuman | DPP | 15.500.000 | 12.330.000 | 79,55 |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | DPP | 79.110.000 | 62.732.977 | 79,309 |
| 12 | Peringatan Hari Besar Nasional | DPP | 22.500.000 | 21.990.000 | 97,73 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | |
| 13 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | DPP | 325.000.000 | 322.790.000 | 99,32 |
| 14 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | DPP | 69.200.000 | 62.825.000 | 90,79 |
| 15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | DPP | 70.500.000 | 44.809.863 | 63,56 |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | |
| 16 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | DPP | 7.000.000 | 6.987.000 | 99,81 |
| 17 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | DPP | 61.045.000 | 61.025.000 | 99,77 |
| 18 | Penyusunan | DPP | 6.566.000 | 6.550.000 | 99,76 |

| | | | | | |
|--|---|-----|-------------|-------------|--------|
| | pelaporan keuangan akhir tahun | | | | |
| 19 | Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran | DPP | 6.500.000 | 6.500.000 | 100,00 |
| 20 | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | DPP | 15.000.000 | 8.980.000 | 59,87 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH | | | | | |
| 21 | Penyusunan Profil SKPD | DPP | 25.000.000 | 17.643.000 | 70,57 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH | | | | | |
| 22 | Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM | DPP | 70.150.000 | 68.425.000 | 97,54 |
| 23 | Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UMKM | DPP | 70.150.000 | 68.078.100 | 97,05 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | | | | | |
| 24 | Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi di Kota Malang | DPP | 118.990.000 | 117.457.000 | 98,71 |
| 25 | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang di Dalam Provinsi | DPP | 125.000.000 | 107.822.000 | 86,26 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------------|-------------|--------|
| 26 | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di dalam kota | DPP | 150.000.000 | 103.016.500 | 68,68 |
| 27 | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang Di Luar Propinsi | DPP | 125.000.000 | 111.237.300 | 88,99 |
| 28 | Bimbingan Teknis SOP dan SOM koperasi | DPP | 100.000.000 | 85.400.000 | 85,40 |
| 29 | Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di sektor riil | DPP | 69.520.000 | 69.520.000 | 100,00 |
| 30 | Workshop Kesehatan Koperasi | DPP | 100.000.000 | 84.555.890 | 84,56 |
| 31 | Validasi Data UKM | DPP | 70.150.000 | 61.000.000 | 86,96 |
| 32 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Bunga Kering | DBHCHT | 225.000.000 | 208.930.150 | 92,86 |
| 33 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan | DBHCHT | 175.000.000 | 159.110.700 | 90,92 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------|
| | Olahan Jamur | | | | |
| 34 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kuliner | DBHCHT | 150.000.000 | 137.583.000 | 91,72 |
| 35 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Dress Painting | DBHCHT | 250.000.000 | 224.974.385 | 89,99 |
| 36 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Anyaman Pandan | DBHCHT | 200.000.000 | 183.832.850 | 91,92 |
| 37 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri | DBHCHT | 715.482.000 | 351.186.800 | 49,08 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------|
| | Tembakau melalui Pelatihan Aplikasi Kain Perca | | | | |
| 38 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kue Kering | DBHCHT | 750.400.000 | 349.812.700 | 46,62 |
| 39 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Pembuatan Hantaran | DBHCHT | 578.813.000 | 336.330.600 | 58,11 |
| 40 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Benang | DBHCHT | 665.305.000 | 418.539.500 | 62,91 |
| 41 | Pembinaan Kemampuan dan | DBHCHT | 712.000.000 | 321.709.300 | 45,18 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------|
| | Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Pita | | | | |
| 42 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Rajut Benang | DBHCHT | 713.000.000 | 392.933.800 | 55,11 |
| 43 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Gift Box | DBHCHT | 714.000.000 | 401.556.000 | 56,24 |
| 44 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Kain | DBHCHT | 715.000.000 | 344.491.200 | 48,18 |
| 45 | Pembinaan | DBHCHT | 716.000.000 | 343.385.200 | 47,96 |

| | | | | | |
|--|---|--------|-------------|-------------|-------|
| | Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Gelas | | | | |
| 46 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Ukir Kaca | DBHCHT | 720.000.000 | 415.104.800 | 57,65 |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI | | | | | |
| 47 | Fasilitasi Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi | DPP | 100.000.000 | 87.985.427 | 87,99 |
| 48 | Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Koperasi Berkualitas | DPP | 100.000.000 | 78.975.876 | 78,98 |
| 49 | Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Ekonomi Produktif | DPP | 150.000.000 | 113.215.000 | 75,48 |
| 50 | Monitoring Perkembangan Kelembagaan Koperasi | DPP | 50.000.000 | 36.269.858 | 72,54 |
| 51 | Seminar Jati | DPP | 120.000.000 | 92.517.042 | 77,10 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Diri Koperasi dalam rangka Peringatan HUT Koperasi ke-68 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong, memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembentukan keberadaan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang itu sendiri dengan salah satu tujuannya adalah pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Contoh dari kebijakan eksternal adalah memfasilitasi UKM dalam pengaksesan permodalan serta mendorong dan membantu UKM untuk memiliki legalitas, menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan bantuan sarana dan penyediaan modal bagi UKM. Maka dari itu perlu dibentuk suatu paguyuban UKM guna mempermudah UKM memperoleh legalitas, dan pengaksesan permodalan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Dalam memberdayakan agar UKM di Kota Malang semakin berkembang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang semakin gencar membuat berbagai terobosan. Kali ini adalah dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha mikro di Kota Malang melalui Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha Mikro di Hotel Montana

2 Malang pada tanggal 2 Mei 2017. Melalui kegiatan ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang bertekad bisa menguatkan UKM di Kota Malang agar semuanya memiliki legalitas, sehingga saat produk yang dibuat dijual ke pasar, produk-produk tersebut mampu bersaing dengan produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menumbuhkembangkan pelaku UKM di Kota Malang, pihak dinas terus melakukan berbagai upaya. Termasuk dengan mengadakan sosialisasi yang digelar selama dua hari mulai 2 Mei 2017 sampai 3 Mei 2017. Sosialisasi dilakukan karena mengembangkan UKM adalah tugas bersama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan usaha kecil. Kegiatan yang diikuti sebanyak 100 peserta pelaku UKM dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Malang ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk memberdayakan usaha-usaha kecil di Kota Malang yang saat ini terus berkembang dengan jumlah yang luar biasa.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Berikut merupakan daftar paguyuban UKM Kota Malang yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Nama Paguyuban UKM Kota Malang

| No | Nama Paguyuban | Ketua Paguyuban | No. Telepon |
|----|--|-----------------|--------------|
| 1 | AMR | Pak Eko | 081332659516 |
| 2 | Amangtiwi | Bu May | 085649922445 |
| 3 | Komunitas Rajut Malang | Bu Aini | 085793535400 |
| 4 | Preman Super | Bu Ida | 081331402645 |
| 5 | APKM | Bu Retno | (0341)498369 |
| 6 | MCF | Bu Yuyun | 081333264770 |
| 7 | Alun-Alun Kuliner | Pak Berni | 082231489857 |
| 8 | Gerabah | Pak Jatmiko | 081703334533 |
| 9 | Keramik | Pak Syamsul | 081555731661 |
| 10 | Khazanah Malang | Bu Pudji Rahayu | 081233600154 |
| 11 | Jaringan Perempuan Pekerja Rumahan Indonesia | Bu Sri Wilujeng | 081102314468 |
| 12 | Republik Arema | Bu Kunarsih | 081217163667 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| 13 | Aku Kuliner | Bu Yanti | 085608255778 |
| 14 | Paguyuban Nasabah Bank Sampah | Bu Tika | 081222001979 |
| 15 | Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia | Bu Andri/ Bu Tini | 085790993447 |
| 16 | Komunitas Perca Napa Guilt | Bu Ortin | 082231411497 |
| 17 | Sentra Kue Basah | Bu Herni | 085100925507 |
| 18 | Himpunan Pengusaha Nahdiyin (HPN) | Pak Bambang | 082330008884 |
| 19 | Wicesa Ayu | Bu Yanti | 081331395904 |
| 20 | WAKAZI | Bu Nur Hamidah | 085100420499 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Produk hasil penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, salah satunya ditempat pada galeri UKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebagai bahan promosi.



Gambar 10 : Produk Keripik dan Tempe hasil produksi UKM Kota Malang

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 11 : Produk Tas hasil produksi UKM Kota Malang
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 12 : Produk Aksesoris hasil Produksi UKM Kota Malang
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 13 : Produk Pakaian hasil produksi UKM Kota Malang
Sumber : Dokumen Pribadi

c. Strategi Kompetitif

Strategi Kompetitif merupakan strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (action) untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi non-profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya sebagai aparatur pemerintah (Nawawi, 2005). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki strategi kompetitif, yaitu strategi yang digunakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk tetap unggul dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas serta tidak kalah dengan dinas-dinas lain di Kota Malang. Strategi Kompetitif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dituangkan dalam program unggulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Program

Unggulan adalah kumpulan kegiatan nyata dan sistematis serta terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018. Mengacu program dan kegiatan serta RPJMD Kota Malang, maka program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tahun 2017, dijabarkan dalam bentuk :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam membuat program kerja unggulan tidak hanya sekedar membuat program tanpa adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berguna agar program yang ditetapkan akan dilaksanakan oleh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sehingga menghasilkan pelayanan unggul dan maksimal sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP). Terciptanya pelayanan yang maksimal akan mempengaruhi tingkat kompetitif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan dinas lainnya. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2016

| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA MALANG | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------------|
| SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM | | | | | |
| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja | 1 dokumen | 12.134.000 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran | Tersusunnya RKA dan DPA | 12 bulan | 11.616.000 |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat | Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat | 1 dokumen | 5.250.000 |
| JUMLAH | | | | | 29.000.000 |
| SUB BAGIAN UMUM | | | | | |
| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya jasa administrasi surat menyurat | 2.600 surat | |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 bulan | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 bulan | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|----------|-------------|
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | 12 bulan | 9.000.000 |
| 5 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK | 12 bulan | 40.000.000 |
| 6 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan & penggandaan | 12 bulan | 35.000.000 |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 bulan | 5.500.000 |
| 8 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 127.000.000 |
| 9 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per-UU-an | 12 bulan | 10.000.000 |
| 10 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan harian | 12 bulan | 17.000.000 |
| 11 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terakomodasiya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bulan | 125.000.000 |
| 12 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Peringatan Hari Besar Nasional | Terlaksananya peringatan hari besar nasional | 12 bulan | 22.500.000 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------|--------------------|
| 13 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung | 12 bulan | 168.000.000 |
| 14 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | 12 bulan | 123.500.000 |
| JUMLAH | | | | | 791.000.000 |

SUB BAGIAN KEUANGAN

| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---------------|--|---|--|-----------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | 1 dokumen |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | 1 dokumen |
| JUMLAH | | | | |

SEKSI ORGANISASI TATA LAKSANA DAN HUKUM BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI

| N O | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGE T | Rp. |
|-----|--|--|---|-------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi | Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi | Terfasilitasinya koperasi dalam pembentukan, perubahan dan pembubaran | 50 koperasi | 100.000.000 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi | Sosialisasi Perkoperasian bagi Pengelola Angkutan Umum | Terlaksananya sosialisasi perkoperasian | 120 orang | 150.000.000 |
| 3 | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi | Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi | Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat | 300 orang | 150.000.000 |

| | | dalam rangka Peringatan Hari Koperasi ke-69 | | | |
|---|--|--|--|-------------|--------------------|
| JUMLAH | | | | | 400.000.000 |
| SEKSI PENGAWASAN BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI | | | | | |
| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
| 1. | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi | Pembinaan, Pengawasan Dan Penilaian Koperasi Berkualitas | Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi berkualitas | 50 koperasi | 150.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 150.000.000 |
| SEKSI PENGEMBANGAN BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI | | | | | |
| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
| 1. | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi | Monitoring Perkembangan Kelembagaan Koperasi | Terlaksananya monitoring | 80 petugas | 50.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 50.000.000 |
| SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA USAHA BIDANG USAHA KECIL MENENGAH | | | | | |
| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
| 1. | Meningkatnya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha | Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UMKM | Meningkatnya legalitas usaha | 125 UKM | 150.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 150.000.000 |

**SEKSI PENGEMBANGAN INFORMASI BISNIS BIDANG USAHA KECIL
MENENGAH**

| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
|---------------|---|---|-------------------------------------|--------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di dalam kota | Meningkatnya jaringan pemasaran UKM | 14 UKM | 156.550.000 |
| 2 | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang di dalam Provinsi | Meningkatnya jaringan pemasaran UKM | 6 UKM | 137.450.000 |
| 3 | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang di luar Provinsi | Meningkatnya jaringan pemasaran UKM | 6 UKM | 459.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 753.000.000 |

**SEKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BIDANG USAHA KECIL
MENENGAH**

| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
|----|---|--|--|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Anyaman Pandan | Meningkatnya kemampuan membuat produk anyaman pandan | 240 orang | 300.000.000 |
| 2 | Meningkatnya UKM dalam | Pembinaan Kemampuan | Meningkatnya kemampuan | 240 orang | 300.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|-------------|
| | mengakses permodalan | dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Aplikasi Kain Perca | membuat produk kain perca | | |
| 3 | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kue Kering | Meningkatnya kemampuan membuat produk kue kering | 240 orang | 300.000.000 |
| 4 | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Kain | Meningkatnya kemampuan membuat produk lukis kain | 240 orang | 300.000.000 |
| 5 | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan | Meningkatnya kemampuan membuat produk lukis gelas | 240 orang | 300.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------------|
| | | Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Gelas | | | |
| JUMLAH | | | | | 1.500.000.000 |

**SEKSI USAHA KOPERASI BIDANG USAHA DAN PEMBIAYAAN
KOPERASI**

| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
|---------------|---|---|---|-------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Riil | Meningkatnya pengembangan usaha koperasi di sektor riil | 70 koperasi | 125.000.000 |
| 2 | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Workshop Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Usaha Koperasi | Meningkatnya pengembangan dan jaringan usaha koperasi | 70 koperasi | 125.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 250.000.000 |

**SEKSI PEMBIAYAAN & JASA KEUANGAN BIDANG USAHA DAN
PEMBIAYAAN KOPERASI**

| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
|---------------|---|---|---|-------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Manajemen Pengelolaan Permodalan bagi Pengawas Koperasi | Meningkatnya kemampuan pengawas koperasi dalam pengelolaan permodalan | 70 koperasi | 100.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 100.000.000 |

**SEKSI USAHA SIMPAN PINJAM BIDANG USAHA DAN PEMBIAYAAN
KOPERASI**

| NO | SASARAN | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Rp. |
|----|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya UKM dalam mengakses | Workshop Kesehatan Koperasi | Meningkatkan kesehatan koperasi | 70 koperasi | 120.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| | permodalan | | | | |
| 2 | Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan | Workshop Perpajakan bagi Koperasi | Meningkatnya kemampuan perpajakan | 100 koperasi | 140.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 260.000.000 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

d. Strategi Defensif

Strategi defensif merupakan strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai (Nawawi, 2005). Faktor pendukung strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis Teknologi Informasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang salah satu contohnya adalah adanya Paguyuban Amangtiwi dan Koperasi Amangtiwi yang menaungi UKM yang merupakan bentuk implementasi strategi defensif. Strategi defensif yang dilakukan dengan mempertahankan keunggulan UKM yang sudah dimiliki, misalnya saja dari segi produk yang dihasilkan dan pemasarannya. Disini paguyuban Amangtiwi berhasil mempertahankan keunggulan produk yang ia miliki karena paguyuban Amangtiwi memiliki strategi pemasaran, strategi produksi serta strategi distribusi yang baik. Strategi pemasaran, strategi produksi dan strategi distribusi diterapkan untuk mendukung strategi defensif yaitu dengan memperhatikan aspek produksi, pemasaran, distribusi dan yang berkaitan dengan keuangan dari UKM. Ibu Sri Widarti, SE

selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mendukung dan memediasi Paguyuban Amangtiwi yang merupakan binaan dari Dinas dengan pihak swasta lain seperti travel agent. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan promosi bagi pelaku UKM Kota Malang yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini Paguyuban Amangtiwi yang merupakan salah satu wadah bagi perkumpulan UKM yang ada di Kota Malang mencoba bermitra dengan pihak swasta yaitu travel agent. Dalam kerjasama tersebut pihak travel agent membantu UKM dalam pemasaran produknya.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu May selaku ketua Paguyuban Amangtiwi yang mengatakan bahwa:

“Paguyuban Amangtiwi memang kompak dalam menjalin kerja sama untuk membuat produknya menjadi unggul di masyarakat. Salah satu bentuk keunggulannya adalah menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki strategi pemasaran yang handal. Disini paguyuban Amangtiwi berhasil mempertahankan keunggulan produk yang ia miliki karena paguyuban Amangtiwi memiliki strategi pemasaran, strategi produksi serta strategi distribusi yang baik. Strategi pemasaran, strategi produksi dan strategi distribusi diterapkan untuk mendukung strategi defensif yaitu dengan memperhatikan aspek produksi, pemasaran, distribusi dan yang berkaitan dengan keuangan dari UKM.” (wawancara tanggal 10 September 2017, pukul 13.00 WIB di Rumah Ibu May)

Mempertahankan keunggulan atau prestasi yang dicapai sebagai bentuk dari strategi defensif diperlukan adanya pemilik UKM atau

paguyuban UKM yang melek teknologi serta berkemauan keras untuk maju dan berkembang. *Mindset* masyarakat yang maju maka dalam pengembangan produk UKM akan dapat berkembang dengan mudah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat UKM baik dalam segi permodalan maupun dalam bentuk sosialisasi. Berkembang atau tidaknya suatu UKM tergantung dari pemilik UKM tersebut mau berkemauan keras untuk berkembang atau tidak. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki kekuatan untuk meraih peluang yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SDM aparatur untuk memfasilitasi pengembangan UKM;
2. Sosialisasi kebutuhan program UKM kepada pemerintah kota untuk meningkatkan dukungan pembiayaan;
3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan usaha UKM;
4. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi;
5. Menyusun program pembangunan UKM dan yang sinergis lintas instansi.

e. Strategi Diversifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan sebelumnya, atau berbeda dari strategi yang dipergunakan organisasi profit lainnya di bidang pemerintah

dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan (Nawawi, 2005). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang belum menerapkan strategi ini, karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam menjalankan tugas dan program-programnya semua berlandaskan pada Rencana Program, Kegiatan SKPD 2013-2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sesuai ketetapan Pemerintah Kota Malang. Program dan kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Malang untuk tahun 2013-2018 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Program, Kegiatan SKPD 2013-2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

| Tahun | Program | Kegiatan |
|--------------|--|--|
| 2014 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan manajemen koperasi 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP Koperasi 3. Melaksanakan Pelayanan dan Fasilitasi pendirian dan Akta Perubahan anggaran dasar Koperasi 4. Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM 5. Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi |
| | Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM 2. Melaksanakan Misi Dagang Indonesia bagi UMKM |
| | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan 2. Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk Unggulan Sentra UMKM |

| | | |
|-------------|---|--|
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| 2015 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| | Program Peningkatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian |

| | |
|---|---|
| Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | <p>Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan RKA dan DPA |
| Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif 2. Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP Koperasi. 4. Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM 5. Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi. 6. Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi 7. Fasilitasi Pendirian Koperasi 8. Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi 9. Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis 10. Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi 11. Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan Permodalan. 2. Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Data KUKM 3. Peningkatan jaringan Kerjasama |

| | | |
|-------------|--|--|
| | | <p>antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS</p> <p>4. Penyelenggaraan promosi Produk UMKM</p> |
| 2016 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. penyediaan makanan dan minimal 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan RKA dan DPA |
| | Program mengembangkan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM |
| | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif 2. Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi. 3. Melaksanakan pendidikan dan |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | <p>pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP Koperasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM 5. Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi. 6. Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi 7. Fasilitasi Pendirian Koperasi 8. Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi 9. Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis 10. Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi 11. Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren 12. Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 13. Pembinaan , Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi 14. Penyebaran Model-model Pola pengembangan Koperasi 15. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi |
| | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan 2. Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk Unggulan Sentra UMKM 3. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM 4. Monitoring dan evaluasi Informasi Produk unggulan Sentra UKM 5. Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS |
| | Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah |
| 2017 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>komunikasi, sumberdaya air dan listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun 2. Penyusunan RKA dan DPA |
| | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif 2. Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP Koperasi. 4. Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM 5. Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi. 6. Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi 7. Fasilitasi Pendirian Koperasi 8. Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 9. Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis 10. Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi 11. Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren 12. Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 13. Pembinaan , Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi 14. Penyebaran Model-model Pola pengembangan Koperasi 15. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi |
| | Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM |
| | Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah |
| | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan 2. Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk Unggulan Sentra UMKM 3. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM 4. Monitoring dan evaluasi Informasi Produk unggulan Sentra UKM 5. Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS |
| 2018 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan RKA dan DPA |
| | Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM | <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM |
| | Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah. |
| | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM | <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan 2. Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk Unggulan Sentra UMKM 3. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM 4. Monitoring dan evaluasi Informasi Produk unggulan Sentra UKM 5. Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS |
| | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif 2. Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP Koperasi. 4. Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi. 6. Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi 7. Fasilitasi Pendirian Koperasi 8. Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi 9. Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis 10. Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi 11. Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren 12. Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 13. Pembinaan , Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi 14. Penyebaran Model-model Pola pengembangan Koperasi 15. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi |
|--|--|--|

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

f. Strategi Preventif

Strategi Preventif merupakan strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah/tindakan (*action*) untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan (Nawawi, 2005). Strategi preventif dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tidak lepas dari adanya permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah sulitnya menyelenggarakan RAT dan

permasalahan yang dihadapi UKM mengenai kesalahan persepsi pelaku UKM yang menganggap bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah tempat meminjam modal. Demi mengatasi kesalahan persepsi masyarakat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menerapkan strategi preventif yang dilakukan dengan membuat program dan mengatur langkah untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi terhadap permodalan kepada pelaku UKM. Sosialisasi yang diadakan tersebut diharapkan pelaku UKM dapat memahami tentang permodalan dan mengerti mengenai aturan permodalan sebagaimana mestinya. Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Jadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam menaggulangi permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku UKM membuat satu kegiatan sosialisasi kepada para pelaku UKM di Kota Malang. Sosialisasi tersebut telah kita jalankan pada tanggal 2 Mei 2017 lalu di Hotel Montana 2 Malang dengan tema Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha Mikro. Melalui kegiatan ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang bertekad bisa menguatkan UKM di Kota Malang agar semuanya memiliki legalitas, sehingga saat produk yang dibuat dijual ke pasar, produk-produk tersebut mampu bersaing dengan produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menumbuhkembangkan pelaku UKM di Kota Malang, pihak dinas terus melakukan berbagai upaya.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam melakukan sosialisasi tentunya guna mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki beberapa sasaran sebagai pengembangan visi dan misi dinas. Secara umum, sasaran tersebut mengacu pada kemudahan dalam pembentukan UKM, kualitas/mutu UKM, kuatnya permodalan serta meningkatnya fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang di mata publik. Pelaksanaan dalam mencapai sasaran tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang telah melakukan langkah-langkah kegiatan dalam mendukung kebijakan yang telah ditempuh di tahun 2016, antara lain:

1. Peningkatan fasilitasi Kemudahan Legalitas Badan Usaha UKM
2. Pelaksanaan bimbingan teknis perkoperasian
3. Pelaksanaan bimbingan teknis UKM
4. Pelatihan wirausaha
5. Pemberian informasi dan fasilitasi bantuan modal (hibah)
6. Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi
7. Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi
8. Peningkatan mutu kualitas UKM dengan cara studi banding bersama UKM Kota Malang ke daerah yang memiliki kemampuan potensi ekonomi tinggi
9. Penyelenggaraan promosi baik di dalam kota maupun diluar kota
10. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan kelembagaan koperasi



Gambar 14 : Sosialisasi September 2017 di Hotel Sahid Montana 2 Malang

Sumber : malangkota.go.id

Dipimpin oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr. Herman Suryo Kumolo, SH, MS. Paguyuban seyogyanya harus memiliki visi yang sama, tidak hanya sekedar kumpulan dari anggota UKM, terang Herman. Kesamaan itulah yang akhirnya mereka bisa bergotong royong, bagaimana bisa mengatasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di dalam persaingan pasar. UKM tidak boleh hanya sekedar mengejar keuntungan semata, harus memberikan pelayanan yang prima dan yang tidak kalah penting bagaimana paguyuban dapat menaungi para pemilik UKM.



Gambar 15: Pelatihan yang diadakan Dinkop dan UM pembuatan produk olahan

Sumber : malangkota.go.id

Berupaya di dalam meningkatkan kualitas produk dan kreativitas dalam produksi UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengadakan pelatihan pembuatan olahan produk makanan dan sablon yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2017 bertempat di Hotel Pelangi, Kota Malang. Peserta 120 peserta dari 20 Paguyuban yang ada dibagi 2 kelompok yaitu pelatihan membuat produk olahan makanan dan pelatihan sablon, yang diharapkan mampu menambah kreativitas para pelaku UKM di dalam mempromosikan hasil produknya yang ada di E-UKM.

Kota Malang menjadi Kota Branding Koperasi dan UMKM karena pengembangan UKM dan koperasi di Kota Malang sangat pesat, hingga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah hingga Gubernur Jawa Timur.



Gambar 16 : Koperasi dan UMKM Expo 2017 pada 27 Juli 2017 di Grand City Convex

Sumber : malangkota.go.id

Sebanyak 466 peserta yang berasal dari perwakilan 466 UKM yang ada di Kota Malang. Saat ini 767 UKM yang terdata di Dinas

Koperasi dan UKM Kota Malang. Ke depan Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan pendampingan dan pembinaan sehingga semua koperasi bisa sehat, seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Martha MRL Tobing. UKM dituntut sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat demi mampu bersaing dan berperan aktif mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat. Salah satu cara di dalam menjaga persaingan di dalam pasar adalah dengan bimbingan teknologi yaitu pelaksanaannya E-UKM yang dapat meningkatkan jumlah pembeli dan target pasar. Terbukti semakin meningkatnya jumlah UKM yang ada dari tahun ke tahun membuat kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih baik dan meningkat.



Gambar 17: Bimtek E-UKM di dalam rapat anggota di hotel Sahid Montana

Sumber : malangkota.go.id

Langkah-langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tersebut tertuang dalam program-program yang telah dilaksanakan. Terdapat 6 (enam) program Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro yang mengacu pada program dan kegiatan serta RPJMD Kota Malang, adalah :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan UKM
5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
6. Program pengembangan system pendukung usaha bagi UKM

Terlaksananya program-program ini adalah sebagai upaya dalam mewujudkan visi misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Visi tersebut berbunyi “*Terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, dan mandiri*”. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi
2. Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing

g. Strategi Inovatif

Strategi Inovatif merupakan strategi yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) agar organisasi non-profit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pemerintahan khususnya di

bidang tugas pokok masing-masing, sebagai keunggulan atau prestasi (Nawawi, 2005). Strategi inovatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang perlu mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pengolahan data informasi UKM. Pengoptimalisasian penggunaan sarana dan prasarana tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya peluang untuk menekan ancaman yang mungkin saja terjadi. Peluang untuk menekan ancaman dalam pengembangan UKM berbasis teknologi informasi di Kota Malang menggunakan strategi inovatif. Strategi inovatif diimplementasikan dengan penerapan e-business bagi koperasi dan UKM. Strategi Inovatif berbasis teknologi informasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu dengan pemanfaatan teknologi e-koperasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mendobrak kebiasaan lama dalam mengumpulkan data dan melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Agar kondisi perkoperasian dan UKM Kota Malang yang masih aktif dan beroperasi tetap bertahan di Kota Malang pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sudah menyiapkan berbagai skema mengembangkan dunia perkoperasian dan UKM, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sistem pemasaran dalam jaringan (online) dengan menggerakkan e-koperasi merupakan salah satu terobosan yang kini dialami. Selain itu, peningkatan kapasitas paguyuban UKM digencarkan dengan memberi bekal kemampuan teknologi informasi melalui sosialisasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan para pelaku UKM nantinya bisa meleak

teknologi dan semakin canggih dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan sehingga pendapatannya pun meningkat.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Strategi inovatif dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dilakukan berlandaskan strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Strategi yang dibangun ini dilandasi dengan informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan jasa surat menyurat;
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- e) Penyediaan alat tulis kantor;
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j) Penyediaan makanan dan minuman;
- k) Peringatan Hari Besar Nasional;

- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - d) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - e) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
 4. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
 - a) Penyusunan Profil SKPD.
 5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - a) Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
 - b) Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UKM.
 6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- a) Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi di Kota Malang
- b) Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UKM Kota Malang di Dalam Provinsi
- c) Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UKM di dalam Kota
- d) Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UKM Kota Malang di Luar Provinsi
- e) Bimbingan Teknis Standart Operasional Prosedur dan Standart Operasional Manajemen Bagi Koperasi di Kota Malang
- f) Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di sektor riil
- g) Workshop Kesehatan Koperasi
- h) Validasi Data UKM
- i) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Bunga Kering (DBHCHT)
- j) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Olahan Jamur (DBHCHT)
- k) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kuliner (DBHCHT)
- l) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat

- di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Dress Painting(DBHCHT)
- m) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Anyaman Pandan (DBHCHT)
 - n) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Aplikasi Kain Perca (DBHCHT)
 - o) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kue Kering (DBHCHT)
 - p) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Pembuatan Hantaran (DBHCHT)
 - q) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Benang (DBHCHT)
 - r) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Pita (DBHCHT)
 - s) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Rajut Benang (DBHCHT)

- t) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Gift Box (DBHCHT)
- u) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Kain (DBHCHT)
- v) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Gelas (DBHCHT)
- w) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Ukir Kaca (DBHCHT)

2. Tantangan strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berbasis teknologi informasi

a. Tantangan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang masih kurang di dalam bidang teknologi dan informasi serta keraguan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di dalam menjalankan media online sebagai salah satu target pasar. Masih banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih ragu untuk menggunakan media online sebagai salah satu target pasar. Karena masih banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang gagap teknologi

(gaptek) dan tidak melek akan teknologi, oleh karena itu pasar online masih sulit berkembang jika tidak diimbangi dengan kemauan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mengoptimalkan fungsi teknologi dan informasi, pelatihan, sosialisasi, serta promosi mengenai strategi menjalankan pasar online. Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

”Kurangunya Sumber Daya Manusia dalam bidang teknologi informasi dapat mempengaruhi perkembangan usaha online pelaku UKM. Pemasaran menjadi tidak maksimal. Maka dari itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sudah mengupayakan berbagai kegiatan guna mengoptimalkan pengetahuan teknologi informasi melalui pelatihan, sosialisasi, serta promosi. (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

2. Permodalan

Struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber-sumber permodalan yang masih lemah. Permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber-sumber permodalan demi menjalankan Strategi Pemerintah Daerah berbasis teknologi dan informasi adalah salah satu tantangan yang akan dan sedang dihadapi di dalam menjalankan strategi tersebut. Demi tercapainya strategi tersebut, pemerintah menyediakan permodalan melalui pinjaman usaha dari pemerintah, sebagai contoh modal usaha hibah dari pemerintah kepada satu

kelompok yang telah memiliki usaha yang telah berjalan dalam waktu tertentu. Modal usaha yang diberikan tersebut biasanya harus diajukan proposalnya kepada Dinas Usaha Mikro. Sumber dana selain itu, terdapat kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah menjalin kerja sama melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Maka dari itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang melakukan kegiatan sosialisasi yang didalamnya membahas permodalan. Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam menaggulangi permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku UKM membuat satu kegiatan sosialisasi kepada para pelaku UKM di Kota Malang. Melalui kegiatan ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang bertekad bisa menguatkan UKM di Kota Malang agar semuanya memiliki legalitas dan modal yang cukup. Dengan adanya legalitas dan modal yang cukup, para pelaku UKM dapat memproduksi barang-barang yang bagus dan berkualitas, serta dalam hal pemasarannya pun menjadi mudah. Untuk menumbuhkembangkan pelaku UKM di Kota Malang, pihak dinas terus melakukan berbagai upaya.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

b. Tantangan Eksternal

1. Pengetahuan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pengetahuan pelaku UKM tentang strategi pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi masih kurang. Hal tersebut menyebabkan sulit berkembangnya strategi pemerintah dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang

berbasis teknologi dan informasi. Keinginan masyarakat untuk berkembang cenderung *stagnan* dan sulit untuk menerima perubahan di dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Untuk menjadikan UKM yang sejahtera sebenarnya gampang-gampang sulit mas, tergantung bagaimana mindset para pelaku UKM itu sendiri. Program kita akan berjalan lancar kalau masyarakat gampang diatur dan nurut dengan aturan kita, tetapi jika mereka bandel ya sulit untuk menumbuhkan kesejahteraan itu. Selama mereka mempunyai mindset untuk maju kedepan dan terus berkembang dapat dipastikan mereka akan memperoleh kesejahteraan. Ditambah jaman sekarang ini teknologi informasi semakin maju, mereka harusnya dapat menggunakan kecanggihan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran UKM”. (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sudah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bentuk upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang melalui beberapa program efektif dan inovatif, yaitu:

Tabel 8. Program Efektif dan Inovatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

| PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH | |
|--|---|
| 1. | Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM |
| 2. | Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UKM |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | |
| 1. | Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan UKM di Kota Malang |
| 2. | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UKM Kota Malang di Dalam Provinsi |
| 3. | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UKM di dalam kota |
| 4. | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UKM Kota Malang Di Luar Propinsi |
| 5. | Bimbingan Teknis SOP dan SOM UKM |
| 6. | Workshop Pengembangan UKM di sektor riil |
| 7. | Workshop Kesehatan UKM |
| 8. | Validasi Data UKM |
| 9. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Bunga Kering |
| 10. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Olahhan Jamur |
| 11. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kuliner |
| 12. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Dress Painting |
| 13. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Anyaman Pandan |
| 14. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Aplikasi Kain Perca |
| 15. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kue Kering |
| 16. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Pembuatan Hantaran |
| 17. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Benang |
| 18. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Pita |
| 19. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Rajut Benang |
| 20. | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di |

| | |
|--|---|
| 0. | Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Gift Box |
| 2 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di |
| 1. | Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Kain |
| 2 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di |
| 2. | Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Gelas |
| 2 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di |
| 3. | Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Ukir Kaca |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI | |
| 1. | Fasilitasi Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran UKM |
| 2. | Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Koperasi Berkualitas |
| 3. | Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Ekonomi Produktif |
| 4. | Monitoring Perkembangan Kelembagaan UKM |
| 5. | Seminar Jati Diri Koperasi dalam Rangka Peringatan HUT Koperasi ke-68 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

2. Responsifitas Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)

Responsifitas pelaku UKM terhadap strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Strategi yang dijalankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang seringkali belum dipublikasikan secara massal kepada masyarakat umum. Masyarakat umum masih sedikit yang mengetahui tentang Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang dijalankan. Karena masyarakat umum adalah salah satu target pasar dan membantu keberlangsungan Usaha Kecil dan Menengah, maka Dinas Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang seringkali melakukan sosialisasi terhadap para pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan terhadap para pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga sangat berguna bagi perkembangan Usaha Kecil dan Menengah.

Pelatihan-pelatihan tersebut dilaksanakan supaya para pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga secara tidak langsung mempublikasikan Strategi Dinas Usaha Kecil dan Mikro Kota Malang tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa responsifitas masyarakat sangat penting bagi perkembangan Usaha Kecil dan Mikro. Karena masyarakat sebagai salah satu target pasar dan penggerak perekonomian Usaha Kecil dan Menengah tersebut. Responsifitas masyarakat sangat perlu dikembangkan, karena Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berbasis teknologi informasi tersebut sangat berpengaruh dari responsifitas masyarakat. Ibu Sri Widarti, SE selaku Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengatakan bahwa:

“Responsifitas pelaku UKM yang rendah menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk mewujudkan UKM yang maju. Contohnya saja dari evaluasi pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas, para pelaku UKM masih ada yang tidak melakukan inovasi terhadap keterampilan yang telah didapat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sehingga pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang hanya sebuah tindakan yang sia-sia tanpa adanya tindak lanjut dan realisasi dari pelaku UKM.” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

3. Rekayasa Teknologi untuk Mengoptimalkan Strategi Pemerintah Daerah di dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Malang

Rekayasa teknologi merupakan teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Rekayasa teknologi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah wujud dari strategi yang dilakukan sebagai upaya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Rekayasa teknologi ini sangat penting bagi inovasi pelaku-pelaku Usaha Kecil dan Menengah sebagai wujud dari strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Rekayasa Teknologi yang dimaksud adalah berupa *Electronic-UKM* atau dapat disingkat *E-UKM*.

Perkembangan dunia TI yang pesat telah memberikan peluang untuk mengembangkan bisnis UKM. Pemanfaatan TI untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari produksi, administrasi, pemasaran, dll. Pemanfaatan TI terutama internet bisa menjadi solusi pemasaran produk UKM yang efektif dan efisien. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan media internet untuk mempromosikan bisnis UKM, antara lain: internet bekerja 24 jam sehingga informasi yang disebar melalui internet bisa diakses kapanpun tanpa ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat sehingga informasi dari internet bisa diakses dari manapun. Internet juga sudah sangat mudah

diakses mulai dari warnet, rumah, kantor, tempat-tempat umum seperti mall, kampus, perpustakaan bahkan internet sudah sangat mudah diakses melalui perangkat *handphone*. Sekarang ini masyarakat telah menjadikan internet sebagai trend untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Peluang yang ada sangat potensial, sudah seharusnya para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) memanfaatkan internet sebagai media pemasaran produk-produk UKM.

Para pelaku bisnis UKM dapat menggunakan *website* untuk membantu pemasaran seperti dengan membuat katalog produk atau bahkan sebagai media penjualan dengan menggunakan fasilitas toko *online*. Penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan dengan menjadi fasilitator pemasaran melalui *E-UKM*.

E-UKM merupakan salah satu inovasi dan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang dilakukan serentak di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai solusi pengembangan dan pemberdayaan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah atau UKM tersebut. *E-UKM* yang dimaksud adalah sebuah analogi dan bentuk dari pasar online yang dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia bahkan mancanegara. *E-*

UKM tersebut berupa sebuah situs atau web yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan mudah. E-UKM berupa sebagai pasar online dan memasarkan berbagai macam produk-produk hasil UKM.

E-UKM berfungsi sebagai pasar yang sangat efektif, efisien, dan memiliki jumlah pembeli dalam jumlah yang sangat besar, karena seluruh masyarakat umum dapat mengakses E-UKM tersebut. E-UKM adalah jawaban dari kurangnya jumlah pembeli, kurangnya mobilisasi pasar dan kurangnya keefektifan pasar langsung. E-UKM diharapkan sebagai solusi inefisiensi dari pemasaran produk UKM sebelum berkembangnya teknologi dan informasi seperti saat ini. E-UKM tersebut berisikan berbagai produk-produk UKM, berita-berita seputar UKM dan kegiatan-kegiatan kecil seputar UKM yang disediakan.

Era digital seperti sekarang pelaku UKM di Kota Malang dituntut lebih kreatif untuk menawarkan barang produksinya lewat media on line. Supaya meningkatkan omset penjualannya. Menyikapi hal itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku UKM agar melek digital. Workshop sehari digelar di lantai 5 gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Kota Malang bertemakan Malang Go Online Road to One Million Pahlawan Digital yang membahas tentang E-UKM.

Kegiatan ini diikuti 700 peserta terdiri dari pelaku UKM, mahasiswa UIN, komunitas, media dan pahlawan digital. Keempatannya dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, Ibu Tri Widyani

P., M.Si Senin tanggal 4 September 2017. Ibu Tri Widyani P, mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Blanja.com telah membantu para pelaku UKM dalam memberikan edukasi dan wadah untuk berekspansi ke dunia digital. Hal ini sebagai semangat dan motivasi bagi para pelaku UKM yang ingin mengembangkan produknya melalui E-UKM. Pemerintah Kota Malang juga mendukung gerakan E-UKM, karena Kota Malang merupakan kota pariwisata dan produk UKM-nya harus terus berkembang.

Tujuan dari sosialisasi E-UKM tersebut adalah untuk meningkatkan kemajuan kegiatan usaha para pelaku UKM dengan menumbuh kembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan demi meningkatkan kualitas SDM para pelaku UKM. E-UKM juga mendorong pengembangan usaha para pelaku UKM di Kota Malang. Dengan adanya sosialisasi, para pelaku usaha UKM diharapkan mampu mendapatkan pendampingan baik dalam pengembangan usahanya maupun percepatan perolehan omset yang akan berimbas pada terbukanya akses pembiayaan, pemasaran, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan lainnya bagi para pelaku UKM

Adanya E-UKM tentunya akan memunculkan paguyuban E-UKM, sehingga antar pelaku UKM dapat bekerjasama dan berbagi informasi.

1. Tujuan Paguyuban E-UKM Kota Malang

- a. Sebagai wadah pelaku UKM yang berdomisili di Kota Malang yang mempunyai keinginan kuat untuk mandiri untuk mempromosikan dan memasarkan produknya secara online.

- b. Sebagai media pengembangan pribadi pengusaha melalui organisasi yang ada dalam binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.
- c. Sebagai media pembelajaran bagi pelaku UKM dalam pengembangan usaha baik itu pengembangan secara konvensional maupun secara Jaringan Online (Market Online).
- d. Sebagai wadah bagi seluruh anggota untuk berekspresi dan berkreasi melalui ide-ide inovatif yang aplikatif untuk tujuan bisnis.

2. Visi Paguyuban E-UKM Kota Malang

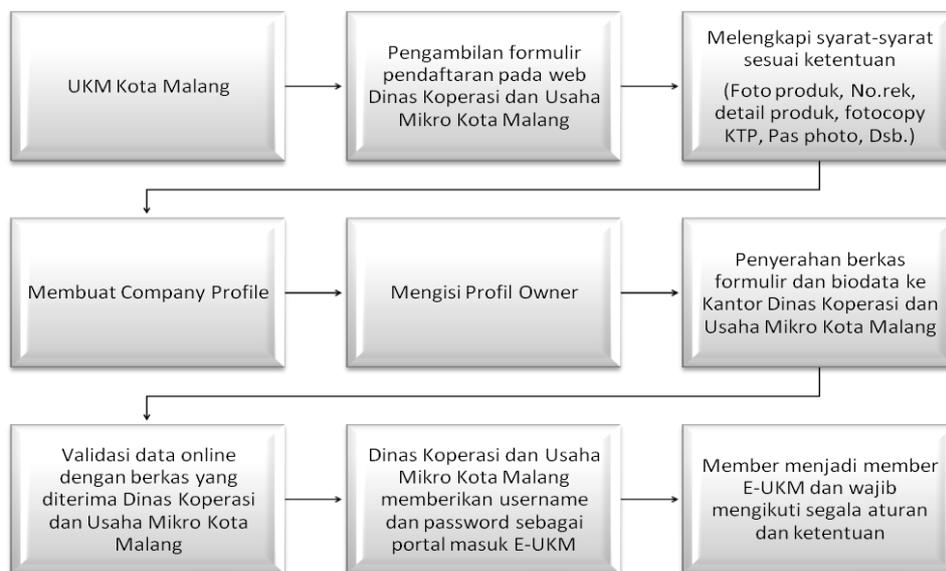
Menjadi wadah pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Malang yang memainkan peran dalam perekonomian bangsa dengan melalui penciptaan lapangan kerja dengan melakukan pengembangan usaha melalui pemasaran konvensional dan pemasaran *Online*.

3. Prosedur Pendaftaran E-UKM Kota Malang

Awal dari pemasaran Online, anggota E-UKM akan dipasarkan produknya oleh pelaku pasar Online, member baru yang berminat untuk bergabung dikomunitas E-UKM Malang, maka harus mendaftar melalui email E-UKM Malang, yang mana formulir pendaftarannya semuanya telah tersedia di website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Syarat dan Ketentuan Bergabung Paguyuban E-UKM Malang :

- a) Foto Contoh Produk yang di cetak dan dilengkapi ,Sbb:

- Daftar harga Konsumen.
 - Nomor Rekening Bank.
 - Seluruh isi Foto didalamnya sudah tertera info masing-masing foto, seperti bahan, ukuran, warna, dll
 - Syarat dan Ketentuan Reseller. (tidak wajib)
- b) Foto copy KTP.
- c) Mengisi Formulir Pendaftaran.
- d) Pas Photo 2 lembar 3×2 dan 1 lembar 4×6.
- e) Usaha minimal sudah berjalan 1 tahun.
- f) Membuat *Company Profile*.
- g) Mengisi Profile Owner.
- h) Untuk Penyerahan biodata Map UKM, warna map diserahkan kepada petugas E-UKM sesuai dengan bidang usaha UKM :
- Fashion Map Plastik lish merah.
 - Kuliner Map Plastik lish kuning.
 - Kreatif Map Plastik lish hijau.
 - *Handy Craf* Map Plastik lish biru.
- i) Bersedia mengikuti setiap acara / prosedur yang diadakan oleh Komunitas
- j) Member akan diberikan Usermane dan Password untuk masuk ke portal E-UKM untuk memasarkan produknya secara mandiri



Gambar 18 : Prosedur Pendaftaran Member E-UKM Kota Malang

Sumber : Data diolah peneliti

4. Keuntungan Member Paguyuban E-UKM Malang.

- a) Member diberikan pelatihan pelatihan indor dan outdoor yang diatur jadwalnya oleh Paguyuban E-UKM Malang.
- b) Member diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran-pameran dalam Paguyuban E-UKM Malang, agar lebih membantu promosi dan pemasaran member.
- c) Member diberikan kesempatan untuk mempromosikan sekaligus memasarkan melalui *website* secara gratis yang disediakan oleh Paguyuban E-UKM Malang.

Dengan dibentuknya E-UKM Kota Malang, tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku UKM dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu sendiri. Pembentukan E-UKM sesuai dengan asas dan tujuan

UKM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasar 2 yaitu:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi Ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan, dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis teknologi dan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi yaitu:
 1. Strategi agresif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa revitaliasi terhadap UKM yang tidak sehat di Kota Malang, melakukan pembinaan pengelolaan manajemen koperasi, dan mengevaluasi badan hukum UKM.
 2. Strategi Konservatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui kebijakan internal yaitu mengelola pelaksanaan program-program pembangunan dan kebijakan eksternal yaitu memfasilitasi UKM dalam pengaksesan permodalan, mendorong dan membantu UKM untuk memiliki legalitas, menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan bantuan sarana dan penyediaan modal bagi UKM.
 3. Strategi Kompetitif yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berupa penyusunan rencana kegiatan dan anggaran,

pengembangan jaringan pemasaran produk UKM di dalam kota dan Provinsi ataupun luar Provinsi, sosialisasi peningkatan fasilitas kemudahan legalitas Badan UKM.

4. Strategi Defensif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Malang berupa membentuk paguyuban salah satunya adalah paguyuban Amangtiwi yang berhasil mempertahankan produk yang ia miliki dan memiliki pemasaran yang baik.
 5. Strategi diversifikasi belum dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam menjalankan tugas dan program-programnya semua berlandaskan pada Rencana Program, Kegiatan SKPD 2013-2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.
 6. Strategi Preventif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berupa sosialisasi peningkatan fasilitas kemudahan permodalan dan legalitas UKM, agar seluruh UKM yang ada di Kota Malang memiliki legalitas dan modal yang cukup.
 7. Strategi Inovatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berupa penerapan e-business bagi koperasi dan UKM yang berupa e-koperasi.
6. Penetapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Teknologi dan Informasi di Kota Malang terdapat tantangan-tantangan di dalam menjalankan strategi tersebut.

1. Tantangan Internal yang terdapat dalam Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berupa SDM yang masih kurang di dalam bidang teknologi dan informasi serta keraguan pelaku UKM di dalam menjalankan media online sebagai salah satu target pasar dan struktur permodalan serta keterbatasan memperoleh sumber-sumber permodalan yang masih lemah.
2. Tantangan Eksternal yang terdapat dalam Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berupa pengetahuan masyarakat tentang strategi pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi yang masih kurang menyebabkan sulit berkembangnya UKM berbasis teknologi dan informasi dan responsifitas pelaku UKM terhadap strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang belum dipublikasikan secara optimal kepada masyarakat umum.
7. Rekayasa teknologi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yaitu E-UKM yang berupa *website* atau *electronic* sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memperluas target pemasaran, dan pengoptimalan pasar *online*.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka terdapat beberapa saran dalam pelaksanaan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan UKM Berbasis Teknologi dan Informasi di Kota Malang, antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi, pembinaan, pelatihan-pelatihan yang lebih intensif lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM di dalam bidang teknologi dan informasi, dan dapat menjalankan dengan optimal media online tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan dan target pasar.
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang perlu melakukan pengoptimalan dalam strategi agresif, agar memiliki sumber-sumber permodalan dari berbagai sumber, salah satunya sponsor yang dapat meningkatkan dan menguatkan permodalan di dalam pelaksanaan strategi dan menunjang kegiatan permodalan para pelaku UKM.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, pemaparan iklan dengan mengoptimalkan sosial media, agar masyarakat benar-benar merespon dengan baik tentang rekayasa teknologi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B Susanto. 2009. *Reputation-Driven Corporate Social Responbillity Pendekatan strategik Manajemen dalam CSR*. Jakarta : Esensi.
- Abdullah Rozali. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, Petter. 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta : BPFEE.
- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta : Media Prasarana Press.
- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Media Saran.
- Azmi, Yan. 2009. *Pengertian Informasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2017. (<http://bappeda.malangkota.go.id>).
- Bagir, Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bowornwathana, Bidhya and Clay G. Wescott. 2007. "Comparative Governance Reform In Asia: Democracy, Corruption, And Government Trust". *Electronic Journal*. Volume 8. (<http://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr/article/viewFile/29/29>)
- Chandler, Alfred.2007. *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*. Massachusetts: Harvard University Massachusetts Institue of Technology.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017. (<http://dispendukcapil.malangkota.go.id>).
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. 2017. (<http://dinkop.malangkota.go.id>).
- Falih, Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Freddy, Rangkuti. 2007. *Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadari, Nawawi. 2005 *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hariadi, Bambang. 2003. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Jimmy Mohamad. 1991. *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Cetakan I*. Semarang: Dahara Prize.
- Indrajit R. E dan Pranoto, R.D. 2002. *Konsep Manajemen Supply Chain*. Jakarta: Grasindo.
- Ishak. 2008. *Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi*. Malaysia: Study Perpustakaan dan Informasi Pahang.
- Isworo, Wiyono, Hadi. 2007. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Ganeca Exact.
- J, Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 2017. (<http://jdih.jatimprov.go.id>)
- Kaho, Riwu Josef. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Rewarga negara Indonesia, Identifikasi yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Rajawali.
- Kartiwa, Asep, dan Nugraha. 2012. *Mengelola Kewenangan Pemerintah*. Bandung: Lepsindo.
- Learned, Christensen, Andrews, dan Guth. 1965. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Ulama.
- Malau, Natalia Artha, SE, M.Si. 2015. *Strategi Pemberdayaan Ekonommi Kerakyatan*. Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS". Volume 1 No. 4. (<http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2016/03/STRATEGI-PEMBERDAYAAN-EKONOMI-KERAKYATAN.pdf>)
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition*. Sage Publication, Inc.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tupoksi Stuktur Organisasi.
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang 2017. (<http://digilib.malangkota.go.id>).
- Pradana. 2009. Respirasi. (<http://www.one.indoskripsi.com>).
- Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Sarwono. 2008. Masyarakat Miskin dan Keberlanjutan Prasarana Penghidupannya: Analisis Diskursus Tentang Kapital Sosial Masyarakat Miskin dalam Mengakses Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Disertasi Doktor tidak dipublikasi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Simamora, Henry. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius (editor). 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia; Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat?.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sondang P. Siagian. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Elek Media Kompetindo.
- Sondang P. Siagian. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sritua, Arif. 2002. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

- Suryaningrat, Bayu. (1980). *Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya*. Jakarta: Metro Pos.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Bumi Aksara.
- Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia(SANKRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Syaukani, H.R. 2003. *Strategi & Potensi Kutai Kartanegara Era Otonomi & Globalisasi*. Jakarta: Indomedia.
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI.
- Wayong, J. 1975. *Azaz dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Jambatan.
- Yolivia Astrianiez Seesar. 2010. *Perbandingan Implementasi Insourcing, Co-Sourcing, dan Outsourcing Dalam Pengembangan Sistem Informasi*. Bogor : Majalah Ilmiah IPB.
- Zuariah, Nurul, Dra. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Informan : Kasi Perlindungan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Malang

1. Apa saja program inovatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dilihat dari sudut pandang Teknologi Informasi?
3. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi?
4. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi?
5. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan multistakeholder sejauh ini?
6. Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan kepada UKM?
7. Anggaran yang digunakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang diperoleh dari mana saja?
8. Apakah ada pemberian pinjaman dana dari sektor lain?
9. Bagaimana pembagian rincian anggaran dalam setiap kategori UKM?

10. Apa saja strategi baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang berbeda dari strategi sebelumnya?
11. Dalam menetapkan strategi, apakah melibatkan pemanfaatan sumber daya dalam organisasi? Apa saja sumber daya yang dilibatkan? (keuangan, tenaga, teknologi)
12. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi dengan pemanfaatan sumber daya yang ada?
13. Bagaimana mengembangkan dan menguatkan kemampuan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam melaksanakan strategi-strategi yang ada untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi?
14. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi? Faktor internal dan eksternal?
15. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi? Faktor internal dan eksternal?
16. Apakah ada pendampingan kegiatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang terhadap jalannya UKM?
17. Apakah ada evaluasi setelah dilakukan program yang dijalankan?
18. Berapakah jumlah UKM Kota Malang dari tahun pertahun?
19. Apakah ada UKM sehat dan UKM tidak sehat? Berapa jumlahnya?

20. Menurut anda, apa saja peluang yang ada dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi?
21. Apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan rekayasa teknologi di dalam mengoptimalisasikan strategi pemerintah daerah di dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
22. Menurut anda, apa saja tantangan terbesar bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan bagaimana cara menanggulangnya?

**Informan : Ketua Paguyuban UKM Kota Malang (Amangtiwi, AMR,
Komunitas Rajut Malang, dan Alun-Alun Kuliner)**

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam mengembangkan UKM Kota Malang?
2. Bantuan apa saja yang telah diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk paguyuban UKM Kota Malang?
3. Apa faktor pendukung benjalannya UKM Kota Malang berbasis teknologi informasi?
4. Apa faktor penghambat benjalannya UKM Kota Malang berbasis teknologi informasi?
5. Apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang telah menjalankan tugasnya dengan maksimal?
6. Pelatihan apa saja yang telah diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang kepada paguyuban UKM Kota Malang?

7. Sosialisasi apa saja yang telah diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang kepada paguyuban UKM Kota Malang?
8. Program-program apa saja yang telah diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang kepada paguyuban UKM Kota Malang?
9. Apakah ada monitoring dan evaluasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang terhadap program yang telah dilaksanakan?
10. Darimana paguyuban mendapatkan modal untuk membuat dan menghasilkan produk?
11. Apa tanggapan anda terhadap teknologi informasi?
12. Menurut anda seberapa efektifkah UKM Kota Malang yang dikemas melalui pasar online?
13. Menurut anda, apa saja tantangan bagi UKM dan bagaimana cara menaggulangnya?



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/07.08.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Publik FIA UB Malang No. 10258/UN10.F03.11.11/PN/2017 tgl. 25 Juli 2017 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : REZA NANTA TONNY I.D. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 135030507111017.
- c. Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada Dinas Koperasi & UKM Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- DiskopUM Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 1 September 2017*.

Malang, 1 Agustus 2017



DICKY HERYANTO, SH., MM.
 Pembina
 NIP. 19690511 199703 1 002

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Kajur Adm. Publik FIA UB Malang;
 Yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Reza Nanta Tonny Islam Dermawan

Nomor Induk Mahasiswa : 135030507111017

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 09 Juli 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kendalsari Barat I/02 Malang

Email : rezananta68@gmail.com

Pendidikan :

1. TK Persatuan Istri Guru (PIG) Kota Malang Tamat tahun 2001
2. SDN Lowokwaru 2 Malang Tamat tahun 2007
3. SMPN 3 Malang Tamat tahun 2010
4. SMAN 7 Malang Tamat tahun 2013

